



**PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO**

---

**RENCANA KERJA  
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
PENANAMAN MODAL, ESDM DAN TRANSMIGRASI  
PROVINSI GORONTALO  
TAHUN 2023**

**PROVINSI GORONTALO**



**GUBERNUR GORONTALO**

**SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR**

**NOMOR : 117 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)  
DINAS PENANAMAN MODAL, ESDM DAN TRANSMIGRASI  
TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR GORONTALO,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11, 13, 15, 16 perauran Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah, dimana perangkat daerah harus menyusun renja perangkat daerah;
  - b. bahwa dalam rangka penyusunan renja perangkat daerah tahun 2023 perlu ditetapkan Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dalam hal ini Dinas Penanaman Modal ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Tahun 2023.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

18. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Gorontalo;
20. Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo.

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : **TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PENANAMAN MODAL, ESDM DAN TRANSMIGRASI TAHUN 2023**

**Kesatu** : Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir.

**Kedua** : Tugas Tim Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi adalah sebagai berikut :

1. Mengkaji dan mengevaluasi hasil capaian program dan kegiatan urusan Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi berdasarkan rencana strategi tahun 2017-2022;
2. Melakukan identifikasi masalah dan isu strategis urusan Penanaman Modal, Perizinan, Energi Ketenagalistrikan, Sumber Daya Mineral, Ketenagakerjaan, Transmigrasi;
3. Menyusun rancangan awal Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo berdasarkan rencana strategi tahun 2023-2026;
4. Menyelenggarakan Forum OPD kabupaten/kota se provinsi Gorontalo;
5. Merumuskan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas, urusan masyarakat, hasil forum OPD dan hasil jaring aspirasi masyarakat dan DPRD Provinsi Gorontalo;
6. Menelaah rancangan awal RPMD Provinsi Gorontalo 2023 – 2026 dan menyelaraskan program dan kegiatan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai kewenangan;
7. Menyusun program dan kegiatan sesuai dengan pagu indikatif dan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu;
8. Menyusun rancangan akhir Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo berdasarkan rencana strategi tahun 2023-2026.

**Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gorontalo  
Pada Tanggal : 17 Februari 2022

**WAKIL GUBERNUR**  
  
**IDRIS RAHIM**



LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR GORONTALO  
NOMOR : 117  
TANGGAL : 17 Februari 2022  
TENTANG : TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PENANAMAN MODAL,  
ESDM DAN TRANSMIGRASI PROVINSI GORONTALO TAHUN 2023

---

PENGARAH DAN  
PENANGGUNG JAWAB : BAMBANG TRI HANDOKO, SP, M.Si  
KETUA : Ir. RUGAYA BIKI, M.Si  
SEKRETARIS : MASRUL, ST  
ANGGOTA :

**1. TIM PENYUSUN BAGIAN SEKRETARIAT**

KOORDINATOR : Ir. RUGAYA BIKI, M.Si  
Anggota : 1. Drs. HALID AMALI  
2. MERIYANTI NALOLE, SE, M.Ec.Dev  
3. FUNGIONAL UMUM BAGIAN SEKRETARIAT

**2. TIM PENYUSUN BIDANG PERIZINAN**

KOORDINATOR : Dra. SRI YULIANTI DUNGA  
Anggota : 1. TRIANA SULISTYA UTAMI, SE  
2. MANIYVAH LASUNTE, S.Kom  
3. YUNI HAGU, S.Pi, M.Si

**3. TIM PENYUSUN BIDANG PENANAMAN MODAL**

KOORDINATOR : Drs. MUSANIF NIODE, M.Ec.Dev  
Anggota : 1. NANA YULIANA ENGGOA, SS, MM  
2. HAYATI KALUKU, SS  
3. TRISDAMAYANTI ALI S.Sos

**4. TIM PENYUSUN BIDANG ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN**

KOORDINATOR : RASAM SABAYA, ST  
Anggota : 1. MINARNI T. PODUNGGE, ST  
2. NASUTION, ST  
3. AZIZ S. AYUBA, A.Md, ST

**5. TIM PENYUSUN BIDANG SUMBER DAYA MINERAL**

KOORDINATOR : ABD. RAKHMAT DANGKUA, ST  
Anggota : 1. HAMSIAH MONOARFA, ST  
2. TRESYA YASIN, ST  
3. ZAINAL RAMDAN FARIED, ST, M.Si

**6. TIM PENYUSUN BIDANG TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA**

KOORDINATOR : AMIR HAMZAH HADJU, S.Sos  
Anggota : 1. SISKAROSITA MOOTALU, SE, MM  
2. BUDIYANTO RAHIM, SE  
3. MASTINA DJAKANI, SH

**7. TIM PENYUSUN UPTD. BALAI LATIHAN KERJA**

KOORDINATOR : EDWING HULOPI, SE  
Anggota : 1. AYU TRIANA ILA, S.Pi, M.Ec.Dev  
2. YULIANTO UTIARAHMAN, S.Sos  
3. SYAFIIN S. NAPU, SKM, M.Kes

**8. Unsur BAPPEDA Provinsi Gorontalo**





## LEMBAR PENGESAHAN

Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo sebagai dasar dan arah dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2023 guna mendukung pencapaian target Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam RPD Tahun 2023-2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Gorontalo, Juli 2022  
KEPALA DINAS



**BAMBANG TRIHANDOKO, SP, M.Si**  
NIP. 19750823 199903 1 004





## KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah dipanjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas izin dan perkenannya, kami dapat menyusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Tahun 2023 sebagai salah satu dokumen perencanaan yang wajib disusun oleh setiap Organisasi Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Tahun 2023 merupakan penjabaran tahun pertama Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo (RENSTRA) Tahun 2023-2026, sebagai konsekuensi logis pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Gorontalo tahun 2023-2026 di sektor Penanaman Modal dan Perizinan; Sektor Energi Ketenagalistrikan dan Sumberdaya Mineral serta sektor Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Dokumen Renja ini menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2023, disusun dengan melibatkan seluruh pejabat fungsional maupun struktural dari setiap bidang, sekretariat dan Balai Latihan Kerja. Kami menyadari dokumen ini masih jauh dari sempurna, karenanya dengan senang hati kami mengharapkan masukan seluruh pihak yang berkepentingan menuju ke arah perbaikan untuk melaksanakan tugas-tugas kedepan, terima kasih.

Gorontalo, Juli 2022  
KEPALA DINAS



**BAMBANG TRIHANDOKO, SP, M.Si**  
NIP. 19750823 199903 1 004





## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	ii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	4
1.3. Maksud dan Tujuan .....	5
1.4. Sistematika Penulisan .....	5
<b>BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN 2021</b>	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Capaian Renstra Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi .....	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Tahun 2021 .....	20
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi .....	50
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	53
2.5. Telaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	56
<b>BAB III : TUJUAN dan SASARAN</b>	
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional .....	61
3.2. Tujuan dan Sasaran .....	67
3.3. Program Kegiatan .....	68
<b>BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>74</b>
<b>BAB V : PENUTUP</b>	
5.1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian .....	93





5.2.	Kaidah-kaidah Pelaksanaan .....	94
5.3.	Rencana Tindak Lanjut .....	94

**LAMPIRAN**





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD), adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun. Dokumen Renja Dinas Penanaman Modal Energi Ketenagalistrikan, Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Tahun 2023 mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahun 2023 pemerintah daerah, mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program OPD yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 (RPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023.
2. Renja merupakan acuan OPD untuk memasukan program kegiatan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dan perencanaan program kegiatan yang dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2023.
3. Renja OPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan instansi untuk mengetahui sejauhmana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja OPD pada tahun 2021.
4. Penyusunan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berpedoman hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan, dengan tujuan memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.





5. Penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada rancangan akhir RKPD.

Dokumen perencanaan pembangunan tahun pertama Renstra Dinas 2023-2026 disusun dalam rangka mengimplementasikan pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026 dengan pertimbangan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai, kebijakan pemerintah pusat (Kementerian/Lembaga terkait) kebutuhan masyarakat dan pemangku kepentingan serta perubahan lingkungan yang strategis. Mengingat pentingnya dokumen Renja OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja OPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta disusun dengan berpedoman pada:

1. Berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2021 dan mengacu pada RKPD tahun 2023 serta RPD tahun 2023 – 2026.
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD tahun 2023 serta RPD tahun 2023 – 2026.
3. Program dan kegiatan dalam Renja OPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum musrenbang dan Forum OPD.





4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.
5. Program dan kegiatan Tahun 2023 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimuktahirkan dengan Kepmendari Nomor 050-5889 tahun 2021.
6. Instruksi Mendagri Nomor 70/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang masa jabatan Kepala Daerahnya akan berakhir tahun 2022.

Dokumen Renja OPD Penanaman Modal ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Tahun 2023 juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam RPD pada tahun 2023 Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD
2. Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah
3. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
4. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.





5. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
6. Review terhadap Rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
7. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan
8. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.
9. Program dan kegiatan Tahun 2023 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Kepmendagri 050-5889 tahun 2021 tentang Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, Renja yang telah tercantum dalam KUA-PPAS digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Kerja dan Anggaran OPD, olehnya penyusunan Renja OPD sangat ditentukan oleh kemampuan OPD dalam menganalisa, menyusun, mengimplementasikan, mengendalikan, mengorganisasikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi dinas.

## 1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja 2023 Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo berpedoman pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo.





2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang, Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
12. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2021, tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2022.





13. Surat Edaran Gubernur Gorontalo Nomor 050/Bappeda/31/I/2022 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 – 2026.
14. Surat Edaran Gubernur Gorontalo Nomor 050/Bappeda/290/III/2023 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja OPD Tahun 2023.
15. Surat Edaran Gubernur Gorontalo Nomor 050/Bappeda/720/VII/2023 tentang Pedoman Penyempurnaan dan Penetapan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023.

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja 2023 disusun dengan maksud: (1) sebagai acuan dasar bagi Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara lebih terencana, terarah, terkendali secara dinamis dalam mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi; (2) sebagai pedoman dalam upaya peningkatan investasi; dan (3) sebagai instrumen untuk pemantauan dan evaluasi kinerja organisasi.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo 2023 yaitu: 1) meningkatkan kinerja institusi dan aparatur; 2) meningkatkan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, dan evaluasi program serta kegiatan; dan 3) meningkatkan sinkronisasi program/kegiatan urusan penanaman modal, ESDM, Transmigrasi dan Tenaga kerja serta peningkatan investasi antar institusi dan antar pemerintahan pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

### 1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023, adalah sebagai berikut:

#### **Bab I Pendahuluan:**

##### 1.1 Latar Belakang





- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

## **Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2021:**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Capaian Renstra Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Tahun 2021
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

## **Bab III Tujuan dan Sasaran Program dan Kegiatan**

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

## **Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah**

## **Bab V Penutup**

## **Lampiran-lampiran**





## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN 2021

#### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021 Dan Capaian Renstra Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi.

Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo adalah salah satu OPD yang membantu tugas Gubernur dalam pelaksanaan tugas untuk urusan Penanaman Modal dan Penyelenggaraan pelayanan perizinan; Urusan Energi Ketenagalistrikan dan Sumberdaya Mineral; Urusan Tenaga Kerja dan Urusan Transmigrasi di Provinsi Gorontalo. Dinas ini dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo dan Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Energi Sumberdaya Mineral dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo

Dalam melaksanakan tugas-tugas teknis di bidang ketenagakerjaan dinas ini dilengkapi dengan Unit Pelaksana Teknid Daerah (UPTD Balai Latihan Kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Ketenagakerjaan.

Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi merupakan salah satu OPD yang beban kerjanya telah melebihi beban tugas sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 yakni setiap Organisasi Pemerintah Daerah diatur untuk menangani 3 (tiga) urusan pemerintahan, sementara dinas ini telah menangani 4 (empat) urusan, sehingga dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kurang optimal. Kondisi ini menyebabkan beban kerja masing-masing urusan tidak optimal karena ketersediaan sarana prasarana yang kurang memadai terutama untuk mendukung tugas, Sumberdaya Manusia dan sumber dana yang terbatas.





Pada Tahun 2021, Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi mendapatkan alokasi APBD sebesar **Rp.22.831.641.220,00** setelah perubahan menjadi **Rp. 22.742.574.555,00** yang terdiri atas Belanja Gaji dan Tunjangan sebesar **Rp. 13.969.270.415,00** setelah perubahan menjadi **Rp. 14.579.785.415,00,-** Belanja untuk program dan kegiatan sebesar **Rp. 8.862.370.805,00** setelah perubahan menjadi **Rp. 8.162.789.140,00**. Jumlah program yang dilaksanakan sebanyak 20 (dua puluh ) Program dan 24 (dua puluh empat) kegiatan, terdiri:

- 1) Administrasi Umum Perangkat Daerah sebagai berikut:
  - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Dinas dan BLK)
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sebagai berikut:
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/TW/Sem SKPD
- 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sebagai berikut:
  - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasar Tupoksi
- 4) Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah sebagai berikut:
  - Penyediaan Jasa dan Perlengkapan Kantor
- 5) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebagai berikut:
  - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 6) Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi sebagai berikut:
  - Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal
- 7) Pembuatan Peta Investasi Provinsi sebagai berikut:
  - Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Investasi
- 8) Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kab/kota sebagai berikut:
  - Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik





- 9) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi sebagai berikut:
  - Koordinasi dan sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
  - Koordinasi dan sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
  - Koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
- 10) Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan kluster kompetensi sebagai berikut:
  - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja berdasarkan cluster kompetensi
- 11) Konsultasi Produktivitas pada perusahaan Menengah sebagai berikut:
  - Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas pada perusahaan Menengah
- 12) Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah provinsi sebagai berikut:
  - Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah provinsi.
- 13) Penyelenggaraan pengawasan Ketenagakerjaan sebagai berikut:
  - Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan
- 14) Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Upah Minimum Kab/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kab/Kota (UMSK) sebagai berikut:
  - Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)
- 15) Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian dan Izin Penguasaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi sebagai berikut:
  - Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian dan Penguasaan Air Tanah





- 16) Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) daerah Provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil sebagai berikut:
  - Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi WIUP bukan Logam dan Batuan dalam wilayah 1 (satu) daerah Provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil.
  - Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan WIUP bukan Logam dan Batuan dalam wilayah 1 (satu) daerah Provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil.
- 17) Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi sebagai berikut:
  - Pembinaan dan Pengawasan konservasi Energi Kewenangan Provinsi.
- 18) Penganggaran untuk kelompok masyarakat tidak mampu Pembangunan Sarana sebagai berikut:
  - Penetapan penerima manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu
- 19) Penataan Pesebaran Penduduk yang berasal dari lintas Daerah Kab/Kota dalam satu Daerah Provinsi, sebagai berikut:
  - Koordinasi dan sinkronisasi Kerjasama Pembagunan Transmigrasi antar pemerintah daerah kabupaten/kota dalam satu Daerah Provinsi.
- 20) Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahapan Pemantapan sebagai berikut:
  - Penguatan Infrastruktur Sosial Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman.

Pada bulan Desember 2021, realisasi fisik mencapai 100% dan Keuangan dinas mencapai **Rp. 22.374.201.461,00,-** atau 98,38% dibandingkan dengan pencapaian tahun 2020, maka realisasi keuangan tahun ini lebih tinggi 1, 28%, dimana tahun lalu capaian 97,10% dan realisasi fisik mencapai 100%. Secara lengkap capaian kinerja setiap kegiatan sebagaimana Rencana Kerja tahun 2021 yang telah ditetapkan dapat dilihat pada Lampiran 1 dokumen Rencana Kerja ini.





Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:



**Evaluasi Hasil Renja SKPD**  
**Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo**  
**Triwulan IV Tahun 2021**

Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Provinsi yang mengacu pada sasaran RKPD Provinsi :  
 Tingkat pengangguran terbuka sebesar 3,01 dengan target 3,04 (Data BPS Agustus 2021)

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2022 (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi capaian kinerja Renstra SKPD 4/d tahun lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Provinsi Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Provinsi (2021) yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD Provinsi s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD 4/d Tahun 2021		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.		
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)				
										K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)			K	Rp. (000)
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13 = 12/7*100	14 = 6 + 12	15 = 14/5*100	16	17													
		<b>URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR</b>																											
		<b>DINAS PENANAMAN MODAL, ESDM DAN TRANSMIGRASI</b>																											
1	2 07 01 1.08	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Provinsi	Persentase pelaksanaan perencanaan, evaluasi, monitoring dan pelaporan	100	%	4,301,501,385	100	2,163,736,057	100	%	529,404,644	36	66,063,494	25	158,755,712	21	113,650,650	18	182,682,202	100	521,152,058	100	98	200	2,684,688,115	200	62.42		
			Persentase peningkatan layanan administrasi, sarana prasarana dan SDM Aparatur	100	%	15,243,806,784	100	9,123,148,104	100	%	2,022,211,573	23	457,662,450	23	486,558,125	15	405,592,947	39	616,010,127	100	1,965,823,649	100	97	200	11,088,971,753	200	72.74		
	2 07 01 1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sarana prasarana yang tersedia	100	Sapras	7,689,640,816	60	4,236,880,942	20	Sapras	723,609,397	5	222,582,750	5	173,532,830	5	86,964,710	5	222,257,105	20	705,337,395	100	97	80	4,942,218,337	80	64.27		
			Persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap sarana dan prasarana	100	%	170,000,000	100	68,000,000	100	%	-	-	-	-	-	-	-	100	-	100	0	100	-	200	68,000,000	200	40.00		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah sarana prasarana yang tersedia	100	sapras	7,689,640,816	60	4,326,010,612	20	Sapras	723,609,397	5	222,582,750	5	173,532,830	5	86,964,710	5	222,257,105	20	705,337,395	100	97	80	5,031,348,007	80	65.43	DPMESD MT	
			Persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap sarana dan prasarana	100	%	170,000,000	100	68,000,000	100	%	-	-	-	-	-	-	-	100	-	100	0	100	-	200	68,000,000	200	40.00		
	2 07 01 1.08	Kegiatan penyediaan jasa urusan pemerintahan daerah	Jumlah jasa kantor yang tersedia tepat waktu	30	Jasa Kantor	4,624,482,874	18	3,222,872,509	6.00	Jasa Kantor	993,794,475	1	190,829,700	2	207,885,295	2	258,858,536	1	327,575,022	6	985,148,553	100	99	24	4,208,021,062	80	90.99	DPMESD MT	
			Persentase administrasi UPT BLK tertata dengan baik	100	%	1,269,841,547	100	1,084,119,950	100	%	223,769,701	25	32,000,000	25	92,000,000	25	59,769,701	25	40,000,000	100	223,769,701	100	100	200	1,307,889,651	100	103.00		
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa kantor yang tersedia	30	Jasa Kantor	4,624,482,874	18	3,222,872,509	6	Jasa Kantor	993,794,475	1	190,829,700	2	207,885,295	2	258,858,536	1	327,575,022	6	985,148,553	100	99	24	4,208,021,062	80	90.99		
			Persentase administrasi UPT BLK tertata dengan baik	100	%	1,269,841,547	100	1,090,952,550	100	%	223,769,701	25	32,000,000	25	92,000,000	25	59,769,701	25	40,000,000	100	223,769,701	100	100	200	1,314,722,251	200	103.53	UPT BLK	
	2 07 01 1.05	Kegiatan Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang mengikuti diklat sesuai rencana	100	%	1,489,841,547	100	511,274,703	100	%	81,038,000	25	12,250,000	10	13,140,000	-	0	65	26,178,000	100	51,568,000	100	64	200	562,842,703	100	37.78		
	2 07 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase pegawai yang mengikuti diklat sesuai rencana	100	%	1,489,841,547	100	511,274,703	100	%	81,038,000	25	12,250,000	10	13,140,000	-	0	65	26,178,000	100	51,568,000	100	64	200	562,842,703	200	37.78	DPMESD MT	
2	2 07 01 1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi keuangan	100	%	250,000,000	100	100,000,000	100	%	86,879,952	15.04	13,063,900	21.17	18,390,700	32.00	32,396,900	32.00	23,007,602	100	86,859,102	100	100	200	186,859,102	100	100.00		
	2 07 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD (Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi)	persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi keuangan	100	%	250,000,000	100	100,000,000	100	%	86,879,952	15.04	13,063,900	21.17	18,390,700	32.00	32,396,900	32	23,007,602	100	86,859,102	100	100	200	186,859,102	200	74.74	DPMESD MT	
	2 07 01 1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan	15	Dok	1,500,000,000	9	951,258,690	3	Dok	256,387,565	1	31,360,094	1	77,135,012	1	55,347,400	1	87,473,400	3	251,315,906	100	98	12	1,202,574,596	80	80.17		
			Jumlah Dokumen Evaluasi	25	Dok	1,500,000,000	15	790,368,055	5	Dok	186,137,127	3	21,639,500	1	63,230,000	-	25,906,350	1	72,201,200	5	182,977,050	100	98	20	973,345,105	80	64.89		
	2 07 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan	15	dok	1,500,000,000	9	951,258,690	3	Dok	256,387,565	1	31,360,094	1	77,135,012	1	55,347,400	1	87,473,400	3	251,315,906	100	98	12	1,202,574,596	80	80.17	DPMESD MT	



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2022 (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi capaian kinerja Renstra SKPD s/d tahun lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Provinsi Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Provinsi (2021) yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD Provinsi s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.		
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)			K	Rp. (000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
5		Program Pelayanan Penanaman Modal	Jumlah realisasi Investasi	11.345 Trilyun	4,123,264,069	12.268	2,083,648,540	10.145 Trilyun	351,899,734	1.627	66,846,780	0.311	107,639,850	9.54	82,733,135		94,488,735	11.473	351,708,500	113	100	24	2,435,357,040	209	59.08		
2.18.04.1.01		Kegiatan Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Izin dan non izin yang diterbitkan	2,550 Izin dan non	2,066,783,550	951	1,507,390,774	515 Dok	351,899,734	103	66,846,780	73	107,639,850	92	82,733,135	248	94,488,735	516	351,708,500	100	100	1.467	1,859,099,274	58	89.95		
2.18.04.1.01.01		Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah izin dan non izin yang diterbitkan	2,550 izin dan non izin	2,066,783,550	951	1,507,390,774	515 Izin dan Non izin	351,899,734	103	66,846,780	73	107,639,850	92	82,733,135	248	94,488,735	516	351,708,500	100	100	1.467	1,859,099,274	58	89.95	DPMESD MT	
Rata-rata capaian kinerja (%)																			100	100			58	90			
Predikat Kinerja																			ST	ST							
6		Program Hubungan Industrial	Persentase peningkatan perusahaan yang menyelenggarakan program perlindungan jaminan sosial tenaga kerja	7 %	4,603,628,103	2.93	907,366,000	6 %	356,794,455	-	19,554,600		141,569,360		71,605,000	12.04	121,669,190	12.04	354,398,150	201	99	15	1,261,764,150	214	27.41		
2.07.05.1.02		Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kasus Perselisihan/Sengketa Hubungan Industrial yang diselesaikan	175 kasus	268,286,364	75	68,260,000	50 Kasus	79,992,095	5	8,315,000	15	44,576,500	15	17,580,000	20	8,680,000	55.00	79,151,500	110	99	130	147,411,500	74	54.95		PROG RAM STRA TESI S
2.07.05.1.02.02		Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kasus Perselisihan/Sengketa Hubungan Industrial yang diselesaikan	175 kasus	268,286,364	75	68,260,000	50 Kasus	79,992,095	5	8,315,000	15	44,576,500	15	17,580,000	20	8,680,000	55.00	79,151,500	110	99	130	147,411,500	74	54.95	DPMESD MT	
		Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	Jumlah Dokumen UMP	5 Dokumen	1,175,427,755	3	273,850,000	1 Dokumen UMP	142,432,360	-	11,239,600	-	-	-	34,000,000	1.00	97,192,760	1.00	142,432,360	100	100	4	416,282,360	80	35.42		
		Jumlah perusahaan yang menerapkan upah minimum provinsi	2,300 Perusahaan	2,068,340,392	1,542	347,256,000	550 Perusahaan	134,370,000	172	-	125	96,992,860	28.00	20,025,000	225	15,796,430	550	132,814,290	100	99	2,092	480,070,290	91	23.21			
		Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Jumlah Dokumen UMP	5 Dokumen	1,175,427,755	3	273,850,000	1 Dokumen UMP	142,432,360	-	11,239,600	-	-	-	34,000,000	1	97,192,760	1	142,432,360	100	100	4	416,282,360	80	35.42		
		Jumlah perusahaan yang menerapkan upah minimum provinsi	2,300 Perusahaan	2,068,340,392	1,542	347,256,000	550 Perusahaan	134,370,000	172	-	125	96,992,860	28	20,025,000	225	15,796,430	550	132,814,290	100	99	2,092	480,070,290	91	23.21			
Rata-rata capaian kinerja (%)																			103	99.26			82	38			
Predikat Kinerja																			ST	ST							
7		Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Persentase Jumlah perusahaan yang menerapkan Norma Ketenagakerjaan	12.02 %	2,140,414,033	3.02	378,688,075	7.56 %	168,022,208	2.11	26,430,400	0.09	47,712,338		52,407,300	0.08	39,355,458	2.28	165,905,496	30	99	5	544,593,571	44	26.44		
2.07.06.1.01		Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan	2,049 Perusahaan	2,140,414,033	435	378,688,075	486 Perusahaan	168,022,208	75	26,430,400	100	47,712,338	104	52,407,300	21	39,355,458	300	165,905,496	62	99	735	544,593,571	36	25.44		PROG RAM STRA TESI S
2.07.06.1.01.01		Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan	2049 perusahaan	2,140,414,033	435	378,688,075	486 Perusahaan	168,022,208	75	26,430,400	100	47,712,338	104	52,407,300	21	39,355,458	300	165,905,496	62	99	735	544,593,571	36	25.44	DPMESD MT	
Rata-rata capaian kinerja (%)																			62	99			36	25			
Predikat Kinerja																			R	ST							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2022 (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi capaian Kinerja Renstra SKPD s/d tahun lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Provinsi Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Provinsi (2021) yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD Provinsi s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.		
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)			K	Rp. (000)
8		Program Pengelolaan Aspek Geologi	Persentase pemenuhan air bersih di daerah sulit air	54 %	4,803,677,892	46	2,852,552,040	50 %	538,979,036	47	14,353,900	5.00	430,323,000	4.00	84,209,500		9,890,000	56	538,776,400	112	100	102	3,391,328,440	189	70.60				
9	3.29.02.1.02	Kegiatan Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah laporan pengawasan dan pembinaan	5 laporan (180 Pengusaha Air Tanah)	246,684,242	1	5,400,000	1 Laporan	538,979,036	0	14,353,900	0	430,323,000	1	84,209,500	0	9,890,000	1	538,776,400	100	100	2	544,176,400	40	100.00		PROG RAN STRAT BERS		
			Jumlah titik bor air tanah	54 sumur bor (1140 RTS)	3,339,993,650	50	2,732,552,040	3 Sumur Bor		1		1		1		0		3		100		53	2,732,552,040	98	81.81				
			Jumlah Rekomendasi Teknis untuk perizinan air tanah	30 Rekomendasi teknis Perizinan	285,000,000	17	114,600,000	6 Rekomtek Perizinan		0		7		7		0		14		233		31	114,600,000	103	40.21				
3.29.02.1.02.03		Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah	Jumlah laporan pengawasan dan pembinaan	5 laporan (180 Pengusaha Air Tanah)	246,684,242	1	5,400,000	1 Laporan	538,979,036	-	14,353,900		430,323,000		84,209,500		9,890,000	0	538,776,400			1	544,176,400	20	220.60		DPMESD MT		
			Jumlah titik bor air tanah	54 sumur bor (1140 RTS)	3,339,993,650	50	2,732,552,040	3 Sumur Bor		1		1		1															
			Jumlah Rekomendasi Teknis untuk perizinan air tanah	30 Rekomendasi teknis Perizinan	285,000,000	17	114,600,000	6 Rekomtek Perizinan				3		3															
Rata-rata capaian kinerja (%)																			216.67	99.96			80	74					
Predikat Kinerja																			ST	ST									
9		Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	Persentase usaha pertambangan yang telah melaksanakan pertambangan yang baik dan benar	100 %	3,644,084,559	100	899,165,590	82.91 %	433,183,648	15.98	89,960,122	13.70	157,444,147	31.780	130,881,200	30.00	54,487,812	91.46	432,773,281	110	100	191	1,331,938,871	191	36.55				
10	3.29.03.1.01	Kegiatan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah usaha pertambangan yang dibina dan diawasi (laporan)	378 IUP	1,244,694,857	125	597,165,225	73 IUP	233,195,680	35	72,950,122	30	90,024,147	-	31,753,800	10	38,057,812	75.00	232,785,881	103	100	200	829,951,106	53	66.68		PROG RAN STRAT BERS		
11			Jumlah Rekomendasi Teknis untuk perizinan usaha pertambangan	211 Rekomendasi Teknis Perizinan	1,208,694,851	69	302,000,365	30 Rekomendasi Teknis Perizinan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69	302,000,365	33	24.99		PROG RAN STRAT BERS		
			Jumlah dokumen pengawasan terpadu	5 laporan dan peta	1,190,694,851	0	0	1 Laporan dan Peta	199,987,968	0	17,010,000	0	67,420,000	1	99,127,400	0	16,430,000	1.00	199,987,400	100	100	1	199,987,400	20	16.80				
3.29.03.1.01.03		Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Rekomendasi Teknis untuk perizinan usaha pertambangan	211 Rekomendasi Teknis Perizinan	1,208,694,851	69	302,000,365	30 Rekomendasi Teknis Perizinan	0	-	0	-	-	-	-	-	-	232,785,881	-	100	69	534,786,246	33	44.24		DPMESD MT			
			Jumlah usaha pertambangan yang dibina dan diawasi	378 IUP	1,244,694,857	125	597,165,225	73 IUP	233,195,680	35	72,950,122	30	90,024,147		31,753,800	10	38,057,812	75.00		103		200		53					
3.29.03.1.01.01		Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah dokumen pengawasan terpadu	5 laporan dan peta	1,190,694,851	0	0	1 Laporan dan Peta	199,987,968	-	17,010,000		67,420,000	1	99,127,400		16,430,000	1	199,987,400	100	100	1	199,987,400	20	16.80		DPMESD MT		
Rata-rata capaian kinerja (%)																			68	100			53	36					
Predikat Kinerja																			S	ST									

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2022 (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi capaian kinerja Renstra SKPD s/d tahun lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Provinsi Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Provinsi (2021) yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD Provinsi s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.				
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)			K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
10		Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Persentase peningkatan pemanfaatan sumber energi dan ketenagalistrikan	100 %	20,445,496,825	100	28,743,572,151	92 %	1,088,199,867	79.00	36,143,200		93,531,300		59,989,390	6	750,085,030	85	939,748,920	92	86	185	29,883,321,071	185	145.18		
12	3 29 06 1.06	Kegiatan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan	Jumlah masyarakat tidak mampu yang mendapatkan akses listrik	4,000 RTS	5,227,033,664	1,121	2,775,081,700	450 RTS	1,088,199,867	-	36,143,200	-	93,531,300	-	59,989,390.00	450.00	750,085,030.00	450	939,748,920	100	86	1,571	3,714,830,620	39	71.07		PROG BAK STRUK ESB
	3 29 06 1.06 02	Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah masyarakat tidak mampu yang mendapatkan akses listrik	4,000 RTS	5,227,033,664	1,121	2,775,081,700	450 RTS	1,088,199,867	-	36,143,200	-	93,531,300	-	59,989,390	450	750,085,030	450	939,748,920	100	86	1,571	3,714,830,620	39	71.07		DPMESD MT
Rata-rata capaian kinerja (%)																			100	86			39	71			
Predikat Kinerja																			ST	T							
11		Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Persentase peningkatan pemanfaatan sumber energi dan ketenagalistrikan	100 %	20,445,496,825	100	992,994,328	92 %	214,633,206	79.00	17,030,400	-	81,233,032		51,778,360	6	63,969,250	85.00	214,011,042	92	100	185	1,207,005,370	185	5.90		
	3 29 05 1.04	Kegiatan Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	Jumlah instalasi Biogas yang terpasang (Dana Pendampingan DAK)	580 Unit Biogas	667,451,414	72	107,636,268	488 Unit Biogas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	72	107,636,268	12	16.13			
			Jumlah laporan hasil pengawasan terhadap Badan Usaha Daerah dan Non Badan Usaha penyedia energi	41 28 SPBU dan 13 Agen LPG	304,821,414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	100	-	-	-	-	-	-		
			Jumlah Laporan Penghematan Energi	41 Lap	304,821,414	-	209,867,843	1 Laporan	100,000,000	0	31,000,000	-	4,408,586.00	-	63,969,250.00	-	99,377,836	-	99	-	-	-	309,245,679	-	101.45		
			Jumlah masyarakat yang sadar hemat energi	1,000 Org	440,151,411	200	67,690,000	200 Org	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	200	67,690,000	20	15.38			
			Jumlah kelembagaan pengelola pembangkit EBT yang dibentuk	10 Unit	629,768,795	3	120,915,199	2 Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	3	-	120,915,199	30	19.20			
			Jumlah laporan hasil pengawasan PLTS Terpusat	6 Lap	556,853,710	4	211,527,139	1 Laporan	114,633,206	-	17,030,400	-	50,233,032	-	47,369,774.00	-	114,633,206	100	100	4	-	326,160,345	67	58.57			
			Jumlah FS/DED Pembangkit EBT	12 Dok	705,000,000	2	268,262,879	1 Dok	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	2	-	268,262,879	17	38.05			
			Jumlah data potensi panas bumi untuk pemanfaatan langsung	4 Dok	21,285,000	1	7,095,000	- Dok	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	1	-	7,095,000	25	33.33			
	3 29 05 1.04 07	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Jumlah laporan hasil pengawasan terhadap Badan Usaha Daerah dan Non Badan Usaha penyedia energi	41 28 SPBU dan 13 Agen LPG	304,821,414	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-		DPMESD MT
			Jumlah Laporan Penghematan Energi	20 Lap	406,381,417	3	211,127,843	1 Laporan	100,000,000	-	31,000,000	-	4,408,586	1	63,969,250	1.00	99,377,836	100	99	4	-	107,636,268	12	16.13			
			Jumlah instalasi Biogas yang terpasang (Dana Pendampingan DAK)	580 Unit Biogas	667,451,414	72	107,636,268	488 Unit Biogas	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	72	-	107,636,268	12	16.13			
			Jumlah masyarakat yang sadar hemat energi	1,000 org	440,151,411	200	67,690,000	200 Org	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	200	-	67,690,000	20	15.38			
			Jumlah kelembagaan pengelola pembangkit EBT yang dibentuk	10 unit	629,768,795	3	120,915,199	2 Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	3	-	120,915,199	30	19.20		DPMESD MT	
			Jumlah laporan hasil pengawasan PLTS Terpusat	6 lap	556,853,710	4	211,527,139	1 Laporan	114,633,206	-	17,030,400	-	50,233,032	1	47,369,774	1.00	114,633,206	100	100	5	-	326,160,345	83	58.57		DPMESD MT	
			Jumlah FS/DED Pembangkit EBT	12 Dok	705,000,000	2	268,262,879	1 Dok	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	2	-	268,262,879	17	38.05			
			Jumlah data potensi panas bumi untuk pemanfaatan langsung	4 Dok	21,285,000	1	7,095,000	- Dok	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	1	-	7,095,000	25	33.33			
Rata-rata capaian kinerja (%)																			100	99.69			28	40			
Predikat Kinerja																			ST	ST							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2022 (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi capaian Kinerja Renstra SKPD s/d tahun lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Provinsi Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Provinsi (2021) yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD Provinsi s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.				
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)			K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
12		Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase peningkatan pembangunan dikawasan transmigrasi	100 %	6,370,557,802	64.00	855,919,942	88.00 %	198,199,326	64.00	9,600,000	24	107,005,000		29,475,000		51,581,000	88.00	197,661,000	100	100	152	1,053,580,942	152	16.54		
13	3 32 03 1.01	Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun di kawasan transmigrasi	5 Kawasan	2,586,507,802	-	-	1 Kawasan	198,199,326	-	9,600,000	1	107,005,000		29,475,000.00		51,581,000.00	1.00	197,661,000	100	100	1	197,661,000	20	7.64		
	3 32 03 1.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun di kawasan transmigrasi	5 Kawasan	2,586,507,802	-	-	1 Kawasan	198,199,326	-	9,600,000	1	107,005,000		29,475,000		51,581,000	1.00	197,661,000	100	1	1	197,661,000	20	7.64		DPMESD MT
Rata-rata capaian kinerja (%)																		100	99.73					20.00	7.64		
Predikat Kinerja																		ST	ST								
13		Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase peningkatan masyarakat transmigrasi yang mandiri	100 %	2,781,679,061	100.00	622,602,750	80.25 %	201,199,677	32.00	25,875,000	30.3	89,185,000	30.25	31,810,000		52,521,000	92.55	199,391,000	115	99	193	821,993,750	193	29.55		
14	3 32 04 1.01	Kegiatan Pengembangan Satuan Pemukiman pada Tahap Pemantapan	Jumlah warga transmigrasi yang mandiri	12,274 Orang	1,861,674,012	1,635	622,602,750	300 Orang	201,199,677	75	25,875,000	75	89,185,000	150	31,810,000		52,521,000	300	199,391,000	100	99.10	1,935	821,993,750	16	44.15		PROG RAN STRAT EBB
	3 32 04 1.01 01	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam Rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	Jumlah warga transmigrasi yang mandiri	12,274 Orang	1,861,674,012	1,635	622,602,750	300 Orang	201,199,677	75	25,875,000	75	89,185,000	150	31,810,000		52,521,000	300	199,391,000	100	99	1,935	821,993,750	16	44.15		DPMESD MT
Rata-rata capaian kinerja (%)																		100	99					16	44		
Predikat Kinerja																		ST	ST								
14		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase peningkatan Jumlah tenaga kerja yang dilatih	45.94 %	3,177,894,731	63.28	1,320,130,400	35.74 %	269,499,370	30	25,000,000	2	183,375,949	2.35	24,716,600	-	31,320,900	34.35	264,413,449	96	98	98	1,584,543,849	213	49.86		
			Persentase peningkatan Jumlah tenaga kerja magang	57.06 %	8,782,215,210	88.70	2,378,270,806	48.10 %	1,073,879,994	78.24	43,584,400	-	498,321,481	-	433,924,200	-	97,500,000	78.24	1,073,330,081	163	100	167	3,451,600,887	293	39.30		
15	2 07 03 1.03	Kegiatan Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah	Jumlah Tenaga Kerja Produktif yang dilatih	235 Org	1,588,947,364	35	165,162,000	5 Orang	64,999,676	-	-	2	39,990,350	3.00	24,716,600		-	5.00	64,706,950	100.00	99.55	40.00	229,868,950	17.02	14.47		PROG RAN STRA TEGE I S
	2 07 03 1.03 01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah	Jumlah Tenaga Kerja Produktif yang dilatih	235 org	1,588,947,364	35	165,162,000	5 Orang	64,999,676	-	-	2	39,990,350	3.00	24,716,600		-	5.00	64,706,950.00	100.00	99.55	40.00	229,868,950.00	17.02	14.47		
		Kegiatan Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang dilatih	235 orang: Kab/Kota se Provinsi Gorontalo	1,588,947,367	345	1,154,968,400	45 orang: Kab/Kota se Prov Gorontalo	204,499,694	30	25,000,000	-	143,385,599	-	-	-	31,320,900	30.00	199,706,499	66.67	97.66	375.00	1,354,674,899	100	85.26		
			Jumlah pencari kerja yang dimagangkan	570 orang: Kab/Kota se Prov Gorontalo	4,312,267,978	400	1,807,340,500	175 orang: Kab/Kota se Prov Gorontalo	1,073,879,994	175	43,584,400	-	498,321,481	-	433,924,200	-	97,500,000	175	1,073,330,081	100.00	99.95	575.00	2,880,670,681	100	66.80		





## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Tahun 2021.

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah analisis kinerja. Dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas OPD melakukan klarifikasi output dan outcome yang seharusnya dicapai sehingga memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Analisis kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) yang dilaksanakan dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara bulanan melalui mekanisme *e-Monev*, berkala (triwulan) dan tahunan, selanjutnya hasil pengumpulan data capaian kinerja dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja seperti pada tabel skala nilai peringkat kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.1: Skala Analisis Capaian Kinerja

SKALA NILAI	KATEGORI CAPAIAN KINERJA
>100	Sangat Baik
>80 - 100	Baik
> 55 - 80	Sedang
< 55	Kurang

Penetapan kinerja Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Tahun 2021 menggambarkan capaian 20 (dua puluh) program sasaran dan yang dilengkapi 24 (dua puluh empat) kegiatan kinerja *outcome*. Secara keseluruhan program sasaran dan kinerja *outcome* yang direncanakan pada tahun 2021 secara umum pencapaian realisasi fisik dan keuangan kategori capaian adalah **Baik**.





Capaian Kinerja pelayanan pada Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo dianalisis berdasarkan kinerja masing-masing urusan yang menjadi tugas pokok dinas yaitu:

**a. Kinerja urusan Penanaman Modal dan Penyelenggaraan PTSP**

Sasaran prioritas Pemerintah Provinsi Gorontalo yaitu **Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang inklusif dan berkeadilan** (Peningkatan investasi melalui promosi, pemutakhiran data potensi investasi, publikasi dan penyebaran informasi potensi daerah serta koordinasi dan sinkronisasi pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman modal) yang dilaksanakan oleh bidang Penanaman Modal melalui program (1) Pembuatan Peta Investasi; (2) Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi; (3) Penanaman Modal yang ruang lingkungnya lintas daerah kabupaten/kota; (4) Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

Upaya meningkatkan kualitas dan jaminan penyediaan pelayanan publik kepada masyarakat, Pemerintah Provinsi Gorontalo telah membentuk Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai latihan Kerja yang mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Peraturan Kudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo.

Urusan Penanaman Modal ditangani oleh Bidang Penanaman Modal dan Bidang Perizinan. Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal adalah pencapaian sasaran meningkatnya Jumlah dan minat Investor di Provinsi Gorontalo dengan (1) Program Promosi Penanaman Modal; (2) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal (3) Program Pengendalian





Pelaksanaan Penanaman Modal dan (4) Program Pelayanan Penanaman Modal.

Sasaran Kinerja Urusan Penanaman Modal adalah Meningkatnya Nilai Investasi, indikatornya adalah:

1. Persentase peningkatan realisasi investasi tahun 2021 target 20% capaian sebesar 25,76% atau nilai capai realisasi investasi lebih dari target atau 128,8%. Nilai Kinerja **Sangat Baik**. Sementara capaian Realisasi sebesar Tahun 2020 19,53% atau persentase capaian sebesar 98% atau nilai kinerja **Baik**. Perbandingan peningkatan realisasi investasi jika dibandingkan antara tahun 2020 dengan tahun 2021 kenaikannya sebesar 3,08%.
2. Indikator Kinerja Jumlah PMA/PMDN pada tahun 2021 yang berminat target 2 PMA/PMDN, masuk ke Gorontalo 2 investor dengan demikian capaian target 100%, atau kinerja Baik. Adapun 2 investor yang berminat adalah PT ESAPUTLI PERKASA UTAMA LOKASI Kabupaten Pohuwato (Budidaya Udang Vaname) dan PT BUMI PANUA Lokasi Boalemo. Capaian realisasi di tahun 2020 adalah 2 PMA/PMDN, persentase capaian sebesar 100% atau dengan nilai kerja Baik.
3. Indikator ini mengukur capaian peningkatan realisasi investasi di tahun n dengan realisasi investasi tahun n-1. Target realisasi investasi pada program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi Renja Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Tahun 2021 (indikator jumlah realisasi investasi) investasi sebesar Rp. 10,145 T Capaian nilai investasi sebesar Rp.11,885T atau 117,15% atau kinerja Sangat Baik. Dibandingkan dengan tahun 2020 target sebesar Rp. 8,945 Trilyun mampu mencapai realisasi sebesar Rp. 9,123 Trilyun. Kondisi ini berarti bahwa realisasi melampaui target sebesar 101,99% atau nilai kinerja Sangat Baik. Jika dibandingkan capaian tahun 2020 dengan 2021 mengalami kenaikan sebesar 15,16%.





Capaian Target Nasional Capaian kinerja urusan Penanaman Modal Tahun 2021 Capaian target realisasi investasi nasional Tahun 2021 mencapai Rp. 900,2 Triliyun. Serapan tenaga kerja sebanyak 1.901 orang dan sector terbesar realisasi investasi adalah sector listrik, air dan gas. . Hal ini menunjukkan realisasi investasi yang ditargetkan secara nasional kepada Pemerintah Provinsi Gorontalo lebih besar dari pada target.

Realisasi investasi yang telah ditargetkan oleh Kementerian Investasi/BKPM Pusat kepada Provinsi Gorontalo sebesar Rp. 1,850 Triliyun,- Realisasi mencapai Rp. 2.143 Triliyun, atau mencapai 115,83%. Nilai capaian ini diperoleh dari jenis Investasi PMA sebesar Rp. 1.139 Triliyun (53%) dan PMDN Rp.1.004,- (47%). Hal ini menunjukkan kinerja realisasi investasi yang ditargetkan secara nasional **Sangat Baik**.

Gambaran capaian nilai realisasi investasi menunjukkan bahwa walaupun pada saat pandemi namun peningkatan realisasi investasi di Provinsi Gorontalo mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Peningkatan nilai investasi ini disebabkan oleh ada tambahan modal dan peralatan pada perusahaan/industry yang sudah beroperasi.

Capaian kinerja urusan Penanaman Modal Tahun 2020 untuk realisasi investasi yang telah ditargetkan oleh Kementerian Investasi/ BKPM Pusat kepada Provinsi Gorontalo sebesar Rp. 935.049.690.000,- Realisasi mencapai Rp. 1.666.816.344.576,- atau mencapai 178,26%. Nilai capaian ini diperoleh dari jenis Investasi PMA sebesar Rp. 973.250.244.578 dan PMDN Rp.683.565.100. 000,-. Hal ini menunjukkan kinerja realisasi investasi yang ditargetkan nasional **Sangat Baik**. Jika dibandingkan capaian tahun 2020 dengan 2021 mengalami kenaikan nilai realisasi investasi sebesar Rp. 477 juta.





Tabel 2.2: Analisis Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator	Rencana Capaian (Target)	Realisasi	Capaian (%)	Nilai
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Nilai Investasi	1 Jumlah investor berskala nasional PMA dan PMDN	2 PMA/PMDN	2 PMA/PMDN	100	B
		2 Jumlah Realisasi Investasi	Rp. 10,145 Trilyun	Rp. 11,885 Trilyun	117,15	SB

**Sumber:** Hasil Analisis Data Dinas PM, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Tahun 2021.

Pada program peningkatan promosi dan kerjasama investasi indikatornya adalah Persentase peningkatan jumlah investor target capaian tahun 2021 sebesar 98%, realisasi capaian sebesar 100% ini berarti bahwa realisasi melampaui target dengan persentase capaian sebesar 102,04% atau nilai kinerja **Sangat Baik**. Pada program peningkatan promosi dan kerjasama investasi indikatornya adalah Persentase peningkatan jumlah investor target capaian tahun 2020 sebesar 95%, realisasi capaian sebesar 96,02% ini berarti bahwa realisasi melampaui target dengan persentase capaian sebesar 101,08% atau nilai kinerja **Sangat Baik**. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020, maka terjadi kenaikan sebesar 0,90%.

Kegiatan ini juga menghasilkan inovasi untuk promosi investasi berupa koneksitas promosi investasi dengan kabupaten/kota berupa Aplikasi Promosi Peluang Investasi Gorontalo (APPIG) yang dikembangkan dengan OPD yang menangani urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu kabupaten/kota. Melalui kegiatan ini terbangun kerjasama melalui proses input data potensi investasi yang berada di kabupaten/kota ke system yang bangun oleh provinsi, dalam rangka memudahkan investor untuk mendapatkan informasi potensi investasi.





Capaian kabupaten/kota Realisasi investasi (PMA/PMDN/ dan Non SPIPISE (sektor) tahun 2021 adalah sebagaimana tercantum pada table berikut:

**Tabel 2.3** Capaian kabupaten/kota Realisasi investasi PMA dan PMDN tahun 2020 dan 2021

Kabupaten / Kota	REALISASI INVESTASI (Rp)	
	2020	2021
Kabupaten Gorontalo Utara	959.147.260.343	671.358.879.826
Kabupaten Gorontalo	320.687.404.387	637.113.321.165
Kabupaten Pohuwato	139.660.500.093	507.014.626.407
Kota Gorontalo	102.438.361.363	45.910.106.165
Kabupaten Bone Bolango	97.159.218.392	252.283.726.941
Kabupaten Boalemo	37.722.600.000	29.483.042.932
<b>JUMLAH</b>	<b>1.656.815.344.578</b>	<b>2.143.163.703.436</b>

**Sumber:** Hasil Analisis Data Dinas PM, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Tahun 2021

**Realisasi Investasi Kabupaten/Kota,** Nilai realisasi investasi Provinsi Gorontalo didukung oleh capaian Kabupaten/Kota se Provinsi Gorontalo. Dalam table diatas digambarkan nilai realisasi investasi tertinggi dicapai oleh Kabupaten Gorontalo Utara sebesar 31%, Kabupaten Gorontalo 30%, Kabupaten Pohuwato 24%, Kabupaten Bone Bolango 12% dan Kota Gorontalo 2% dan Kabupaten Boalemo 1%. Pada Tahun 2020 realisasi investasi Kabupaten Gorontalo Utara juga menyumbang nilai tertinggi atau 57,89% dan capaian terendah oleh Kabupaten Boalemo sebesar 2,28%.

**Realisasi Investasi Nasional,** capaian nilai Realisasi investasi nasional tahun 2021 sebesar Rp. 901,0 Trilyun yang kontribusi PMDN sebesar Rp. 447,0 Trilyun dan PMA sebesar Rp. 454.0 Trilyun.

Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam mendorong peningkatan investasi melalui beberapa program/kegiatan antara lain: (1) Penyelenggaraan promosi investasi, (2) Pembuatan Peta Potensi Investasi, (3) Pengendalian Pelaksanaan





Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi dan Penyediaan pelayanan perizinan dan Non Perizinan yang berbasis Sistem Perizinan Berusaha yang terintegrasi secara elektronik **online single submission** (OSS-RBA).

Capaian nilai realisasi investasi didukung oleh jumlah izin dan non izin yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal ESDM dan Transmigrasi pada tahun pada tahun 2021 sebanyak 516 izin dan non izin yang diterbitkan dari target sebanyak 515 izin dan non izin atau 110,19% atau **Sangat Baik**. Sementara tahun 2020 target sebanyak 500 izin dan non izin yang tercapai 482 izin dan non izin atau 96,40%. Pada tahun 2020 tidak mencapai target izin yang dikeluarkan disebabkan izin dan non izin di sector pertambangan yang semula menjadi kewenangan Provinsi, namun dengan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka kewenangan pemberian izin dan non izin menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, sehingga jumlah izin dan non izin yang dikeluarkan oleh PTSP Provinsi Gorontalo tidak mencapai target pada tahun 2020. Jumlah izin dan non izin dan non Izin yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo sebanyak 126 perijinan dan 17 non-perijinan. Waktu pengurusan terlama yaitu izin lingkungan selama 120 hari dan tercepat 1 (satu) hari tanpa biaya (gratis), menjadi 100 Izin dan non izin. Berikut ini tabel capaian kinerja PTSP tahun 2021.

Tabel 2.4 Analisis Capaian Kinerja PTSP Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program Tahun 2021		Persentase (%)	Nilai
			Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	
1.	<b>meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan bersih</b>	- Jumlah izin dan Non Izin yang diterbitkan	515	516	100,19	<b>SB</b>

Sumber: Hasil Analisis Data Dinas PM, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Tahun 2021





Pada Tahun 2021 jumlah izin dan non izin melampaui target didukung oleh mulai dilaksanakan system perizinan *Online Submission System* Berbasis Resiko (OSS-RBA) yang telah dilaksanakan secara nasional melalui Kementerian Investasi/BKPM dan didukung perbaikan pola-pola pelayanan dan inovasi pelayanan perizinan serta penyediaan fasilitas atau sarana pelayanan yang memenuhi standar pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Penyederhanaan jenis dan prosedur layanan, pendelegasian kewenangan perizinan dan non perizinan serta tersusunnya produk-produk hukum tersebut mengatur jenis pelayanan perizinan dan non perizinan berdasarkan bidang urusan pemerintahan; pendelegasian kewenangan perizinan dan non perizinan dari gubernur kepada kepada Kepala Dinas. Sasaran pencapaian penerapan teknologi informasi dan komunikasi pelayanan public pada tahun 2021 telah melaksanakan pelayanan perizinan OSS (*Online Submission Sistem*) atau sistem pelayanan perizinan secara on line sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, Sicantik Cloud, dan SPIPISE. Pada tahun 2020 Dinas telah membangun aplikasi *MOOTAME* yang dimanfaatkan untuk memudahkan untuk monitoring tahapan pelaksanaan perizinan, agar dapat diketahui oleh pemohon izin hal-hal yang mempengaruhi cepat-lambatnya proses penerbitan izin.

Prestasi yang dicapai oleh Dinas Penanaman Modal ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo di Bidang Pelayanan Publik pada tahun 2020 dan 2021 adalah sebagai berikut:

1. Hasil Evaluasi Pelayanan Publik unit Penyelenggara pelayanan Publik Lingkup Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap penyelenggaraan PTSP pada tahun 2021 mendapat predikat sebagai penyelenggaran pelayanan public kategori





- Sangat Baik (A)** nilai 4,51 tahun 2020 kategori Baik (A-) nilai 4,08. Dan nilai rata-rata Provinsi Gorontalo (A) Sangat Baik dengan nilai 4,06.
2. Penilaian Kinerja PTSP dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Kementerian Investasi/BKPM mendapat predikat sebagai penyelenggaraan pelayanan public kategori Sangat Baik dengan skor 84,260.
  3. Penilaian Monitoring Centre for Prevention (MCP) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi tahun 2021 dengan nilai 100% Sangat Baik, dan nilai rata-rata yang dicapai Provinsi Gorontalo 89,72% sementara nilai MCP rata-rata nasional 65%. Nilai MCP kabupaten/kota se Provinsi Gorontalo, sebagai berikut: Kota Gorontalo 89,97%, Pohuwato 84,48%, Kabupaten Gorontalo 77,89%, Kabupaten Bonebolango 72,71%, Kabupaten Boalemo 57,33 dan Kabupaten Gorontalo Utara 45,62%. Pada tahun 2020 dengan nilai 99,60 nilai Sangat Baik.
  4. Penilaian oleh Ombushman Pusat untuk Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan tahun 2021 dengan sampling: pelayanan Izin Lingkungan, Izin Pengelolaan Terminal dan Izin Lokasi dengan skor: **85,42 atau Zona Kepatuhan Hijau**, sementara kumulatif untuk Pemerintah Provinsi Gorontalo **67,58 Zona Kepatuhan Kuning**.

Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Satu Pintu (PTSP) dilaksanakan untuk pencapaian sasaran prioritas Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk meningkatnya penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan bersih dilaksanakan oleh Bidang Perizinan Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi, yaitu penguatan kerangka kebijakan kelembagaan pelayanan dalam rangka kemitraan antara pemerintah dan swasta; peningkatan pelayanan publik terintegrasi; penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik; mendorong inovasi pelayanan public; peningkatan kualitas dan standarisasi kelembagaan pelayanan perizinan (PTSP); penguatan kapasitas





pengendalian kinerja pelayanan public, yang meliputi monitoring dan evaluasi serta pengawasan oleh masyarakat.

Alokasi anggaran untuk urusan Penanaman Modal adalah Rp. 674.371.579 dimana anggaran ini sebelum rasionalisasi sebesar Rp. 1.347.333.650,- atau mengalami refocussing sebesar Rp. 672.961.891,- Realisasi keuangan mencapai 98,70%. (tabel 2.5).

Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Satu Pintu (PTSP) dilaksanakan untuk pencapaian sasaran prioritas Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk **meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan bersih** dilaksanakan oleh Bidang Perizinan Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi, yaitu penguatan kerangka kebijakan kelembagaan pelayanan dalam rangka kemitraan antara pemerintah dan swasta; peningkatan pelayanan publik terintegrasi; penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik; mendorong inovasi pelayanan public; peningkatan kualitas dan standarisasi kelembagaan pelayanan perizinan (PTSP); penguatan kapasitas pengendalian kinerja pelayanan public, yang meliputi monitoring dan evaluasi serta pengawasan oleh masyarakat.

Kegiatan yang mendukung sasaran prioritas ini adalah program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi dengan kegiatan penyelenggaraan PTSP target penerbitkan izin pada tahun 2020 sebanyak 510 izin dan non izin dan realisasi sebanyak 483 izin dan non izin atau 94,71%. Nilai kinerja **baik**. Sedangkan pada tahun 2019 target sebanyak 505 izin dan non izin dan realisasi capaian sebanyak 568 izin dan non izin atau 112,48% nilai kinerja **sangat baik** (lihat tabel 2.4).

Alokasi anggaran untuk urusan Penanaman Modal adalah Rp. 674.371.579 dimana anggaran ini sebelum rasionalisasi sebesar Rp. 1.347.333.650,- atau





mengalami refocussing sebesar Rp. 672.961.891,- Realisasi keuangan mencapai 98,70%. (lihat tabel berikut).

**Tabel 2.5. Anggaran sebelum dan setelah Rasionalisasi Urusan Penanaman Modal Tahun 2021**

No	Program/Kegiatan	Anggaran	
		Sebelum Rasionalisasi	Setelah Rasionalisasi
1.	Program Pembuatan Peta Investasi	<b>Rp 99.999.791,00</b>	<b>Rp 71.773.791,00</b>
	- Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Rp 99.999.791,00	Rp 71.773.791,00
2.	Program Penyelenggaraan promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Provinsi	<b>Rp 207.560.522,00</b>	<b>Rp 68.670.000,00</b>
	- Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Rp 207.560.522,00	Rp 68.670.000,00
3.	Program Penanaman Modal yang ruang lingkupnya lintas Daerah Kab/kota	<b>Rp 359.219.734,00</b>	<b>Rp 351.899.734,00</b>
	- Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis system Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Rp 359.219.734,00	Rp 351.899.734,00
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan daerah provinsi	<b>Rp 652.967.458,00</b>	<b>Rp 574.430.775,00</b>
	- Koordinasi dan sinkronisasi Pemantauan pelaksanaan PM	Rp. 217.199.835,00	Rp. 136.663.152,00
	- Koordinasi dan sinkronisasi Pembinaan pelaksanaan PM	Rp. 271.967.623,00	Rp. 271.967.623,00
	- Koordinasi dan sinkronisasi Pembinaan pelaksanaan PM	Rp. 163.800.000,00	Rp. 163.800.000,00
	Jumlah	<b>Rp. 1.319.747.505,00</b>	<b>Rp.1.066.774.300,00</b>

**Sumber:** Hasil Analisis Data Dinas PM, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Tahun 2021





## b. Urusan Energi Ketenagalistrikan dan Sumber Daya Mineral

Urusan Energi Ketenagalistrikan dan Sumberdaya Mineral pada Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi dilaksanakan oleh Bidang Energi Ketenagalistrikan dan Bidang Sumberdaya Mineral. Sasaran utama yang ingin dicapai Urusan Energi ketenagalistrikan dan Sumberdaya Mineral adalah Meningkatnya Penyediaan Kebutuhan Sumber Air Bersih dan kebutuhan listrik bagi Rumah Tangga Sasaran (RTS) di Provinsi Gorontalo. Pada tahun 2021 program dan kegiatan yang dilaksanakan sama dengan tahun-tahun sebelumnya sebagaimana tercantum dalam dokumen Renstra 2017-2022 dan Renja Tahun 2021, namun dengan dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimuktahirkan dengan Kepmendari Nomor 050-5889 tahun 2021. Program yang dilaksanakan oleh dinas pada tahun 2021 telah disesuaikan dengan nomenklatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri dimaksud.

Program-program urusan ketenagalistrikan dan Sumberdaya Mineral: (1) Program Pengelolaan ketenagalistrikan, (2) Program Pengelolaan Energi Terbarukan, (3) Program pengelolaan Aspek Kegeologian dan (4) Program Pengelolaan Mineral Batubara.

Pada Tahun 2021 untuk urusan Energi Ketenagalistrikan melaksanakan program yang mendukung sasaran prioritas Pemerintah Provinsi Gorontalo yaitu **menurunkan tingkat kemiskinan** melalui Program Pengelolaan ketenagalistrikan kegiatan Penganggaran untuk kelompok masyarakat tidak mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil Perdesaan ditargetkan pemasangan meteran listrik tahun 2021 adalah sebanyak 450 RTS, hasil yang dicapai terpasang sebanyak 450 RTS. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja yang dicapai untuk pemasangan listrik RTS sesuai target atau sebesar 100% dengan nilai kinerja **Baik**. Anggaran untuk kegiatan kelompok masyarakat tidak mampu, Pembangunan Sarana





Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil Perdesaan sebesar Rp. 1.088.199.867,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 939.748.920.- atau 86,36%, jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020 pemasangan RTS pada awal penggaran bantuan listrik gratis akan diberikan kepada 1000 RTS, karena adanya refocusing anggaran, maka penerima bantuan sebanyak 45 RTS, maka realisasi tahun 2020 sebesar 0,045% atau **kurang**.

**Capaian Kabupaten/Kota** Kegiatan Penganggaran untuk kelompok masyarakat tidak mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil Perdesaan yaitu pemasangan listrik bagi RTS di Provinsi Gorontalo dengan rincian kabupaten/Kota sebagai berikut: Kabupaten Boalemo 62 RTS, Bone Bolango 62 RTS Kabupaten Gorontalo 269 RTS, Gorontalo Utara 17 RTS, Pohuwato 30 RTS, Kota Gorontalo 10 RTS dengan Total untuk Provinsi Gorontalo 450 RTS.

Jumlah Desa sudah berlistrik baik PLN dan Non PLN sampai dengan tahun 2021 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.6** Rasio Desa Yang Teraliri Listrik Tahun 2021

NO	KABUPATEN	JUM. KEC	JUMLAH DESA/KELURAHAN BERLISTRIK				BELUM BERLISTRIK	RE (%)
			KEL/DESA	LISTRIK PLN	LISTRIK NON PLN	TOTAL BERLISTRIK		
1	Kab. Boalemo	7	86	86	-	86	-	100%
2	Kab. Bone Bolango	18	165	164	1	165	-	100%
3	Kab. Gorontalo	19	207	206	1	207	-	100%
4	Kab. Gorontalo Utara	11	123	122	1	123	-	100%
5	Kab. Pohuwato	13	104	104	-	104	-	100%
6	Kota Gorontalo	9	50	50	-	50	-	100%
	Provinsi Gorontalo	77	735	727	3	735	-	100%

Sumber: Dinas PM, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Tahun 2021





Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Energi dan Ketenagalistrikan memiliki target 78%, capaian realisasi 78,53% dengan persentase sebesar 100,68% atau Kinerja **Sangat Baik**.

Sasaran Meningkatnya Penyediaan Kebutuhan Sumber Air Bersih bagi rumah tangga yang dilaksanakan oleh bidang Sumberdaya mineral yaitu; tahun 2021 jumlah RTS yang terpenuhi kebutuhan air bersih sesuai target 3 (tiga) sumur bor dan yang terbangun 3 (tiga) atau 100% yang tersebar di Desa Pentadio Timur Kecamatan Telaga dan Desa Ayumolingo Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo; Desa Butu Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bonebolango. Dan 2020 Jumlah RTS yang terpenuhi air bersih memiliki target 4 Sumur Bor (139 RTS), Capaian Kinerja sebesar 4 Sumur Bor (139 RTS) atau capaian Persentase 100% dengan nilai kinerja **Baik**.

**Tabel 2.7:** Analisis Capaian Kinerja Urusan ESDM Tahun 2021

No	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program Tahun 2021		Persentase (%)	Nilai
			Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Sasaran : Meningkatnya Penyediaan Kebutuhan Sumber Air Bersih dan kebutuhan listrik bagi Rumah Tangga Sasaran	- Jumlah Rumah Tangga Sasaran yang terpenuhi kebutuhan listrik	450RTS	450RTS	100	<b>B</b>
		- Jumlah Rumah Tangga Sasaran yang terpenuhi air bersih	150 RTS 3 sumur bor)	150 RTS (3 sumur bor)	100	<b>B</b>
2	Program Ketenagalistrikan	- Persentase peningkatan pemanfaatan sumber energi dan ketenagalistrikan	92%	85%	92,39	<b>B</b>
3	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian)	- Persentase pemenuhan air bersih di daerah sulit air	50%	56%	112	<b>SB</b>
		- Persentase ketersediaan Data Wilayah prospek sumber daya mineral dan Informasi Geologi	20%	20%	100	<b>B</b>
4	Program Pengelolaan mineral dan batubara	- Persentase usaha pertambangan yang telah melaksanakan	82,91	91,46	110,31	<b>SB</b>





		pertambahan yang baik dan benar				
--	--	---------------------------------	--	--	--	--

Sumber: Hasil Analisis Data Dinas PM, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Tahun 2021

Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Energi dan Ketenagalistrikan (Pengelolaan Ketenagalistrikan) target 92% tercapai 85 % atau capaian kinerja 92,39 % kinerja **Baik**; Program Penyelidikan, Pelayanan, Pembinaan dan Pengawasan, Pengendalian Air Tanah (Program Pengelolaan Aspek Kegeologian) target 50% tercapai 56% atau capaian kinerja 112% atau kinerja. **Sangat Baik**. Kegiatan pada program ini dilaksanakan dalam bentuk pemenuhan kebutuhan air bersih di daerah sulit air bersih dengan pembuatan sumur bor tahun 2020 direncanakan 3 sumur bor yang berlokasi di Desa Pentadio, Kecamatan Telaga Biru dan di Desa Ayumolingo Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo dan yang satunya lagi dibangun di Desa Butu Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bonebolango. Sumur Bor digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan air bersih dengan penggunaannya 1 sumur bor dimanfaatkan oleh 50 Rumah Tangga Sasaran sehingga 3 sumur bor yang terbangun melalui APBD Dinas Penanaman Modal ESDM dan Transmigrasi ini akan digunakan oleh 150 RTS. Hal ini menunjukkan kinerja kegiatan ini tercapai 100% atau kinerja **Baik**. Kegiatan ini juga digunakan untuk pembiayaan penerbitan rekomendasi Teknis untuk penetapan izin. Rekomendasi Teknik yang ditetapkan untuk Pemanfaatan air Tanah sebanyak 21 rekomendasi Teknik pada tahun 2021.

Program Pengelolaan Aspek Kegeologian Program Penyelidikan, Pelayanan, Program penyelidikan dan pelayanan geologi untuk menjangkau pembangunan infrastruktur di Provinsi Gorontalo serta penetapan geopark Gorontalo. Pada tahun 2021 penyelidikan dilaksanakan di Kawasan Danau Limboto dan sekitarnya di Kabupaten Gorontalo, target kinerja 1 (satu) dokumen, hasilnya mencapai 100% atau kinerja **Baik**. Pada Tahun 2020 lokasi kegiatan di Kecamatan Bone Pantai Bone Bolango dan Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo dengan target 1 (satu) dokumen hasilnya mencapai 100%





Program Pengelolaan mineral dan batubara dengan kegiatan penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil (nama kegiatan disesuaikan dengan Permendagri No. 90 tahun 2020 yang telah dimuktahirkan dengan permendagri Nomor 50 Tahun 2021).

Tabel 2.8: Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Energi Sumber Daya Mineral

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi tahun 2021			Realisasi Tahun 2020
			Anggaran	Keu	Fisik	Fisik
			Rp	(%)	(%)	(%)
1.	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	<b>Rp 1.088.199.867</b>	<b>939.748.920,00,-</b>	86,36	100	100
	- Penganggaran untuk Pokmas Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Bekermbang Daerah terpencil dan Perdesaan (Pengembangan ketenagalistrikan daerah)	Rp 1.088.199.867	939.748.920,00,-	86,36	100	100
2	- Program Pengelolaan Energi Terbarukan	<b>Rp 216.441.042</b>	<b>Rp 214.011.042</b>	98,88	100	100
	- Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Rp 216.441.042	Rp 214.011.042	98,88	100	100
3.	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	<b>Rp. 538.979.036,-</b>	<b>Rp 538.776.400,-</b>	99,96	100	100
	- Kegiatan Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalan, Izin Pemakaian dan Izin Pengusahaan Air	Rp 538.979.036,-	<b>Rp 538.776.400,-</b>	99,96	100	100





	Tanah dalam Daerah Provinsi					
4.	Program pengelolaan Minerba (Program Pengelolaan pertambangan mineral)	Rp 433.183.648	Rp. 432.773.281	99,91	100	100
	- Kegiatan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) daerah Provinsi dan wilayah laut 12 Mil (Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pertambangan)	Rp 433.183.648	Rp. 432.773.281	99,91	100	100

**Sumber:** Hasil Analisis Data Dinas PM, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Tahun 2021.

### c. Kinerja Urusan Tenaga Kerja

Urusan Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi dilaksanakan oleh Bidang Transmigrasi yang mendukung sasaran prioritas Pemerintah Provinsi **meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang inklusif dan berkeadilan**. Upaya pemerintah Provinsi Gorontalo dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing tenaga kerja melalui pelatihan peningkatan ketrampilan tenaga kerja dan pencari kerja serta pembinaan bagi lembaga pelatihan kerja swasta. Dalam pencapaian sasaran prioritas pemerintah Provinsi Gorontalo Urusan Tenaga kerja mengacu pada kebijakan daerah adalah pengembangan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi mengacu pada standar yang dikembangkan industry dan memperbaiki iklim ketenagakerjaan dan menciptakan hubungan industrial yang harmonis.

Pada tahun 2021 kinerja urusan ketenagakerjaan adalah mendukung penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 3,04% dan realisasi sebesar 3,01%. Kondisi ini lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya dimana tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2020 adalah sebesar





4,28%. Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal ESDM dan Transmigrasi untuk mendorong penurunan angka pengangguran adalah 175 orang pencari kerja yang dimagangkan di beberapa perusahaan yang ada di Kota Gorontalo, 30 orang tenaga kerja yang dilatih yang terdiri dari 2 paket pelatihan pembuatan minyak kelapa dimana masing-masing paket 15 orang. Adapun lokasi pelatihan yaitu di Desa Monano Kec. Bone Raya Kab. Bone Bolango dan di Desa Bukit Aren Kec. Pongongaila Kab. Gorontalo.

Sasaran utama Urusan Tenaga Kerja yang dicapai pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya kondisi hubungan industrial yang kondusif dan kesejahteraan pekerja dengan target 20%, capaian realisasi sebesar 72,72% dengan persentase capaian sebesar 363 % atau nilai kerja **Sangat Baik**. Program Pengembangan Hubungan Industrial memiliki target 6%, capaian realisasi sebesar 12,04% dengan persentase capaian sebesar 200,66 % atau nilai kerja **Sangat Baik**.
- 2) Meningkatnya pengawasan ketenagakerjaan, K3 dan perlindungan pekerja/buruh dengan target 20%, capaian realisasi sebesar 33,33% dengan persentase capaian sebesar 166,67% atau nilai kerja **Sangat Baik**. Program Pengawasan Ketenagakerjaan target 7,56%, capaian realisasi sebesar 2,28% dengan persentase capaian sebesar 30,16% atau nilai kerja **Kurang**.
- 3) Meningkatnya jumlah serapan tenaga kerja dengan target 20%, capaian realisasi sebesar 25,69% dengan persentase capaian sebesar 128,45% atau nilai kerja **Sangat Baik**. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja memiliki target 48,10%, capaian realisasi sebesar 78,24% dengan persentase capaian sebesar 162,66% atau nilai kinerja **Sangat Baik**.





Sasaran utama Urusan Tenaga Kerja yang ingin dicapai pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.9** Analisis Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja tahun 2021

No	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program Tahun 2021		Persentase (%)	Nilai Kinerja
			Target	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Sasaran : Meningkatnya kondisi hubungan industrial yang kondusif dan kesejahteraan pekerja	- Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui perjanjian bersama	20%	72,72%	363%	<b>SB</b>
	Program Pengembangan Hubungan Industrial	- Persentase peningkatan perusahaan yang menyelenggarakan program perlindungan jaminan sosial tenaga kerja	6%	12,04%	200,66%	<b>SB</b>
2.	Sasaran : Meningkatnya pengawasan ketenagakerjaan, K3 dan perlindungan pekerja/buruh	- Persentase pelanggaran hukum di bidang norma ketenagakerjaan yang ditangani	20%	33,33%	166,67%	<b>SB</b>
	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	- Persentase jumlah perusahaan yang menerapkan Norma ketenagakerjaan	7,56	2,28%	30,16%	<b>K</b>
3.	Sasaran : Meningkatnya jumlah serapan tenaga kerja	- Persentase peningkatan jumlah serapan tenaga kerja	20%	25,69%	128,45%	<b>SB</b>
	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	- Persentase peningkatan jumlah tenaga kerja magang	48,10%	78,24%	162,66%	<b>SB</b>
		Persentase peningkatan jumlah tenaga kerja yang dilatih	35,74	34,35	96,11	<b>B</b>

**Sumber:** Hasil Analisis Data Dinas PM, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Tahun 2021

Pada tahun 2020 kinerja urusan ketenagakerjaan adalah mendukung penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 3,23% dan realisasi sebesar 4,28% atau selisih sebesar 1,05 atau capaian sebesar 7,47%. Pada





tahun 2019 target 3,44% capaian 4,06% atau selisih sebesar 0,62%. Kondisi ini disebabkan pada tahun 2020 banyaknya lapangan usaha yang ditutup sehingga mempengaruhi angka serapan tenaga kerja bahkan bertambah dengan angka pemutusan hubungan kerja terutama di sektor industry pariwisata dan perhotelan. Jumlah tenaga kerja yang dilatih dan yang dimagangkan tahun 2020 sebanyak 150 orang, sementara jumlah perusahaan yang telah menerapkan K3 sebanyak 150 perusahaan pada tahun 2020. Sasaran utama Urusan Tenaga Kerja yang ingin dicapai pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- 4) Meningkatnya kondisi hubungan industrial yang kondusif dan kesejahteraan pekerja dengan target 20%, capaian realisasi sebesar 91% dengan persentase capaian sebesar 455 % atau nilai kerja **Sangat Baik**. Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja memiliki target 5%, capaian realisasi sebesar 3,07% dengan persentase capaian sebesar 61,40 % atau nilai kerja **Sedang**.
- 5) Meningkatnya pengawasan ketenagakerjaan, K3 dan perlindungan pekerja/buruh dengan target 20%, capaian realisasi sebesar 100% dengan persentase capaian sebesar 500% atau nilai kerja **Sangat Baik**. Adapun Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan target 4,83%, capaian realisasi sebesar 2,01% dengan persentase capaian sebesar 41,61% atau nilai kerja **Sedang**.
- 6) Meningkatnya jumlah serapan tenaga kerja dengan target 20%, capaian realisasi sebesar 19,55% dengan persentase capaian sebesar 97,45% atau nilai kerja **Baik**. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja memiliki target 39,73%, capaian realisasi sebesar 65,05% dengan persentase capaian sebesar 163,73% atau nilai kinerja **Sangat Baik**. Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja memiliki target 28,10%, capaian realisasi sebesar 33,12% dengan persentase capaian sebesar 117,86% atau nilai kinerja **Sangat Baik**.

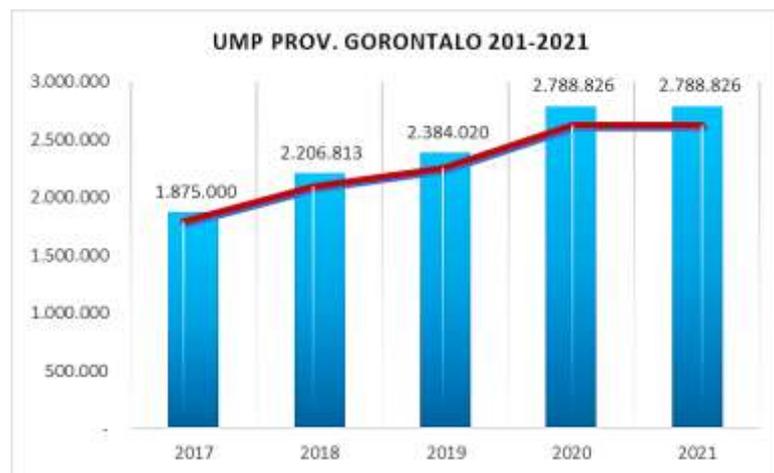




Tabel 2.10: Analisis Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja

Pemerintah Provinsi Gorontalo menjamin perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. Untuk penjaminan hak-hak tenaga kerja setiap perusahaan di daerah Provinsi Gorontalo diwajibkan untuk mengikuti asuransi jamsostek dan tunduk pada peraturan pemerintah termasuk penentuan Upah Minimum Provinsi (UMP). UMP adalah standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja di provinsi gorontalo mengalami kenaikan, jika UMP sebesar Rp. 2.030.000,- pada tahun 2017 dan UMP pada Tahun 2018 sebesar 2.220.000,- atau naik sebesar 9,36%. Tahun 2019 sebesar Rp. 2.348.000 dan pada tahun 2020 sebesar Rp. 2.788.826 serta UMP tahun 2021 sebesar Rp. 2.788.826. Pada tahun 202 ini sebanyak 1.425 perusahaan di Provinsi Gorontalo yang telah membayar upah tenaga kerjanya sesuai dengan besaran UMP Provinsi Gorontalo tahun 2021.

Adapun grafik kenaikan UMP sejak tahun 2017 sd. tahun 2021 adalah sebagai berikut:



**Sumber:** data Olahan Dinas PMESDM dan Transmigrasi 2021

**Gambar 2.** Grafik UMP Provinsi Gorontalo Tahun 2017 s.d. 2021





**Tabel 2.10** Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Ketenagakerjaan tahun 2021

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU 2021 (Rp)	REALISASI TAHUN 2021		
			ANGGARAN	KEU	FISIK
			Rp	(%)	(%)
1.	<b>Program Hubungan Industrial</b>	<b>356.794.455</b>	<b>325.796.910</b>	<b>91,31</b>	<b>100</b>
	- Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	79.992.095	74.991.500	93,75	100
	- Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota	276.802.360	250.805.410	90,61	100
2.	<b>Program Pengawasan Ketenagakerjaan</b>	<b>168.022.208</b>	<b>160.925.496</b>	<b>95,78</b>	<b>100</b>
	- Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	168.022.208	160.925.496	95,78	100
3.	<b>Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja</b>	<b>1.343.379.364</b>	<b>1.274.308.430</b>	<b>98,38</b>	<b>100</b>
	- Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	1.278.379.688	1.209.601.480	94,62	100
	- Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Menengah	64.999.676	64.706.950	99,55	100

**Sumber:** Dinas PM, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Tahun 2021





#### d. Urusan Transmigrasi

Urusan Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi dilaksanakan oleh Bidang Transmigrasi. Sasaran kinerja Urusan Transmigrasi adalah Meningkatnya akses layanan publik dan ekonomi masyarakat transmigrasi dengan indikator kinerja jumlah Kawasan transmigrasi yang dikembangkan. Target kinerja adalah 1 kawasan permukiman transmigrasi dan capaian kinerja 1 kawasan permukiman transmigrasi yang mandiri. Capaian kinerja untuk urusan transmigrasi mencapai 100% atau nilai kinerja **Baik**.

Tahun 2021 Adapun Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi memiliki target 80,25%, capaian realisasi sebesar 92,55% dengan persentase capaian sebesar 115,33% atau nilai kinerja **Sangat Baik**. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi memiliki target 88%, capaian realisasi sebesar 100% dengan persentase capaian sebesar 113,64% atau nilai kinerja **Sangat Baik**.

Tahun 2020 Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi memiliki target 70,25%, capaian realisasi sebesar 90,46% dengan persentase capaian sebesar 128,76% atau nilai kinerja **Sangat Baik**. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi memiliki target 76%, capaian realisasi sebesar 80% dengan persentase capaian sebesar 105% atau nilai kinerja **Sangat Baik**.

Tabel 2.11: Analisis Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi

No	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program Tahun 2020		Persentase (%)	Nilai Kinerja
			Target	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Sasaran : Meningkatnya akses layanan publik dan ekonomi masyarakat transmigrasi	- Jumlah Kawasan transmigrasi yang dikembangkan	1 kawasan	1 kawasan	100	<b>B</b>
	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	- Persentase peningkatan masyarakat	80,25	92,55	115,33	<b>SB</b>





		transmigrasi yang mandiri				
	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	- Persentase peningkatan pembangunan dikawasan transmigrasi	88	100	113,64	<b>SB</b>

**Sumber:** Hasil Analisis Data Dinas PM, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Tahun 2021.

Tabel 2.12 Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Ketransmigrasian

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU 2021 (Rp)	REALISASI TAHUN 2021			REALISASI TAHUN 2020
			ANGGARAN	KEU	FISIK	FISIK
			Rp	(%)	(%)	(%)
<b>1.</b>	<b>Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi</b>	<b>201.199.677</b>	<b>191.671.000</b>	<b>95,26</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	- Kegiatan Pengembangan Satuan Pemukiman pada Tahap Pemantauan	201.199.677	191.671.000	95,26	100	100
<b>2.</b>	<b>Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi</b>	<b>198.199.326</b>	<b>197.661.000</b>	<b>99,73</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	- Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	198.199.326	173.221.000	87,39	100	100

**Sumber:** Dinas PM, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Tahun 2021

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada tabel berikut ini:



**Evaluasi Hasil Renja SKPD**  
**Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo**  
**Triwulan IV Tahun 2021**

Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Provinsi yang mengacu pada sasaran RKPD Provinsi :  
 Tingkat pengangguran terbuka sebesar 3,01 dengan target 3,04 (Data BPS Agustus 2021)

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2022 (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi capaian kinerja Renstra SKPD a/d tahun lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Provinsi Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Provinsi (2021) yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD Provinsi s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD a/d Tahun 2021		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
										K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13 = 12/7*100	14 = 6 + 12	15 = 14/5*100	16	17											
		<b>URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR</b>																									
		<b>DINAS PENANAMAN MODAL, ESDM DAN TRANSMIGRASI</b>																									
1	2 07 01 1.08	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Provinsi	Persentase pelaksanaan perencanaan, evaluasi, monitoring dan pelaporan	100 %	4,301,501,385	100	2,163,736,057	100 %	529,404,644	36	66,063,494	25	158,755,712	21	113,650,650	18	182,682,202	100	521,152,058	100	98	200	2,684,688,115	200	62.42		
			Persentase peningkatan layanan administrasi, sarana prasarana dan SDM Aparatur	100 %	15,243,806,784	100	9,123,148,104	100 %	2,022,211,573	23	457,662,450	23	486,558,125	15	405,592,947	39	616,010,127	100	1,965,823,649	100	97	200	11,088,971,753	200	72.74		
	2 07 01 1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sarana prasarana yang tersedia	100	Sapras 7,689,640,816	60	4,236,880,942	20	Sapras 723,609,397	5	222,582,750	5	173,532,830	5	86,964,710	5	222,257,105	20	705,337,395	100	97	80	4,942,218,337	80	64.27		
			Persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap sarana dan prasarana	100 %	170,000,000	100	68,000,000	100 %	-	-	-	-	-	-	-	100	-	100	0	100	-	200	68,000,000	200	40.00		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah sarana prasarana yang tersedia	100	sapras 7,689,640,816	60	4,326,010,612	20	Sapras 723,609,397	5	222,582,750	5	173,532,830	5	86,964,710	5	222,257,105	20	705,337,395	100	97	80	5,031,348,007	80	65.43	DPMESD MT	
			Persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap sarana dan prasarana	100 %	170,000,000	100	68,000,000	100 %	-	-	-	-	-	-	-	100	-	100	0	100	-	200	68,000,000	200	40.00		
	2 07 01 1.08	Kegiatan penyediaan jasa urusan pemerintahan daerah	Jumlah jasa kantor yang tersedia tepat waktu	30	Jasa Kantor 4,624,482,874	18	3,222,872,509	6.00	Jasa Kantor 993,794,475	1	190,829,700	2	207,885,295	2	258,858,536	1	327,575,022	6	985,148,553	100	99	24	4,208,021,062	80	90.99	DPMESD MT	
			Persentase administrasi UPT BLK tertata dengan baik	100 %	1,269,841,547	100	1,084,119,950	100 %	223,769,701	25	32,000,000	25	92,000,000	25	59,769,701	25	40,000,000	100	223,769,701	100	100	200	1,307,889,651	100	103.00		
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa kantor yang tersedia	30	Jasa Kantor 4,624,482,874	18	3,222,872,509	6	Jasa Kantor 993,794,475	1	190,829,700	2	207,885,295	2	258,858,536	1	327,575,022	6	985,148,553	100	99	24	4,208,021,062	80	90.99		
			Persentase administrasi UPT BLK tertata dengan baik	100 %	1,269,841,547	100	1,090,952,550	100 %	223,769,701	25	32,000,000	25	92,000,000	25	59,769,701	25	40,000,000	100	223,769,701	100	100	200	1,314,722,251	200	103.53	UPT BLK	
	2 07 01 1.05	Kegiatan Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang mengikuti diklat sesuai rencana	100 %	1,489,841,547	100	511,274,703	100 %	81,038,000	25	12,250,000	10	13,140,000	-	0	65	26,178,000	100	51,568,000	100	64	200	562,842,703	100	37.78		
	2 07 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase pegawai yang mengikuti diklat sesuai rencana	100 %	1,489,841,547	100	511,274,703	100 %	81,038,000	25	12,250,000	10	13,140,000	-	0	65	26,178,000	100	51,568,000	100	64	200	562,842,703	200	37.78	DPMESD MT	
2	2 07 01 1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi keuangan	100 %	250,000,000	100	100,000,000	100 %	86,879,952	15.04	13,063,900	21.17	18,390,700	32.00	32,396,900	32.00	23,007,602	100	86,859,102	100	100	200	186,859,102	100	100.00		
	2 07 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD (Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi)	persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi keuangan	100 %	250,000,000	100	100,000,000	100 %	86,879,952	15.04	13,063,900	21.17	18,390,700	32.00	32,396,900	32	23,007,602	100	86,859,102	100	100	200	186,859,102	200	74.74	DPMESD MT	
	2 07 01 1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan	15	Dok 1,500,000,000	9	951,258,690	3	Dok 256,387,565	1	31,360,094	1	77,135,012	1	55,347,400	1	87,473,400	3	251,315,906	100	98	12	1,202,574,596	80	80.17		
			Jumlah Dokumen Evaluasi	25	Dok 1,500,000,000	15	790,368,055	5	Dok 186,137,127	3	21,639,500	1	63,230,000	-	25,906,350	1	72,201,200	5	182,977,050	100	98	20	973,345,105	80	64.89		
	2 07 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan	15	dok 1,500,000,000	9	951,258,690	3	Dok 256,387,565	1	31,360,094	1	77,135,012	1	55,347,400	1	87,473,400	3	251,315,906	100	98	12	1,202,574,596	80	80.17	DPMESD MT	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2022 (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi capaian kinerja Renstra SKPD s/d tahun lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Provinsi Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Provinsi (2021) yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD Provinsi s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021		Unit SKPD Penang gung Jawab	Ket.				
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)			K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
										K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp. (000)			K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
1	2 07 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi	25 Dok	1,500,000,000	15	790,368,055	5 Dok	186,137,127	3	21,639,500	1	63,230,000	-	25,906,350	1	72,201,200	5	182,977,050	100	98	20	973,345,105	80	64.89		
			Persentase keselarasan pelaksanaan program dengan dokumen perencanaan	100 %	168,534,019	100	30,000,000	100 %	-	-	-	-	-	-	-	100	-	100	0	100	-	200	30,000,000	200	17.80	DPMESD MT	
			Hasil penilaian AKIP oleh Inspektorat	B	382,967,366	BB	70,000,000	B	-	-	-	-	-	-	-	B	-	B	0	100	-	BB	70,000,000	BB	18.28	DPMESD	
Rata-rata capaian kinerja (%)																		100	82			103	73				
Predikat Kinerja																		FALSE	T								
2		Program Promosi Penanaman Modal	Persentase peningkatan Jumlah investor	100 %	4,802,206,767	94	880,266,179	98 %	68,670,000	-	5,460,000	94	31,779,800	-	17,290,000	6.00	9,570,000.00	100.00	64,099,800	102	93	194	944,365,979	194	19.67		
3	2 18 03 1.01	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Investor yang berminat	12 Investor	1,240,000,000	10	543,205,667	2 Investor	68,670,000	-	5,460,000	1	31,779,800	-	17,290,000	1.00	9,570,000.00	2.00	64,099,800	100	93.34	12	607,305,467	100	48.98		PROG DAN STRAT BERS
	2 18 03 1.01 01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah investor yang berminat	12 investor	1,240,000,000	10	543,205,667	2 Investor	68,670,000	-	5,460,000	1	31,779,800	-	17,290,000	1	9,570,000	2.00	64,099,800	100	93	12	607,305,467	100	48.98	DPMESD MT	
Rata-rata capaian kinerja (%)																		100.00	93.34			100.00	48.98				
Predikat Kinerja																		ST	ST								
3		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase peningkatan Jumlah Investor	100 %	4,802,206,767	94.00	337,060,512	98 %	71,773,791	-	-	94	26,739,100	-	18,774,000	6.00	24,421,400	100	69,934,500	102	97	194	406,995,012	194	8.48		
	2 18 02 1.02	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah dokumen potensi Investasi	6 Dokumen	1,237,790,550	3	337,060,512	1 Dokumen	71,773,791	-	-	-	26,739,100	-	18,774,000	1.00	24,421,400	1	69,934,500	100	97	4	406,995,012	67	32.88		
	2 18 02 1.02 02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Jumlah dokumen potensi Investasi	6 dok	1,237,790,550	3	337,060,512	1 Dok	71,773,791	-	-	-	26,739,100	-	18,774,000	1	24,421,400	1	69,934,500	100	97	4	406,995,012	67	32.88	DPMESD MT	
Rata-rata capaian kinerja (%)																		100.00	97.44			66.67	32.88				
Predikat Kinerja																		ST	ST								
4		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah realisasi Investasi	11.345 Trilyun	4,123,264,069	12.266	2,083,648,540	10.145 Trilyun	574,430,775	1.627	51,040,800	0.311	120,538,750	9.54	92,068,820		269,972,413	11.473	533,620,783	113	93	24	2,617,269,323	209	63.48		
4	2 18 05 1.01	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah perusahaan PMA/PMDN yang dipantau, dibina dan diawasi	67 PMA/PMDN	1,315,000,000	63	576,499,188	65 PMA/PMDN	138,663,152	8	37,040,800	20	28,798,750	22.00	30,954,000	15	34,592,093	65	131,385,643	100	94.75	128	707,884,831	100	53.83		PROG DAN STRAT BERS
			Jumlah Laporan hasil pemantauan, pembinaan dan pengawasan perusahaan	5 Dokumen	-	0	-	9 Dokumen	271,967,623	0	14,000,000	3	72,585,000	3.00	53,359,820	3.00	117,745,320	9	257,690,140	-	-	9	257,690,140	180	-		
			Jumlah dokumen hasil pemutakhiran data	5 Dokumen	87,000,000	0	0	13 Dokumen	163,800,000	0	0	9	19,155,000	-	7,755,000	4.00	117,635,000	13	144,545,000	-	-	13	144,545,000	100	166.14		
	2 18 05 1.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan PMA/PMDN yang dipantau, dibina dan diawasi	67 PMA/PMDN	1,315,000,000	63	576,499,188	65 PMA/PMDN	138,663,152	8	37,040,800	20	28,798,750	22	30,954,000	15	34,592,093	65	131,385,643	100	95	128	707,884,831	191	53.83	DPMESD MT	
	2 18 05 1.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal (DAK)	Jumlah Laporan hasil pemantauan, pembinaan dan pengawasan perusahaan	5 Dokumen	0	0	0	9 Kegiatan	271,967,623	0	14,000,000	3	72,585,000	3	53,359,820	3	117,745,320	9	257,690,140	100	95	9	257,690,140	-	-		
	2 18 05 1.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal (DAK)	Jumlah dokumen hasil pemutakhiran data	5 Dokumen	87,000,000	0	0	13 kali	163,800,000	0	0	9	19,155,000	-	7,755,000	4	117,635,000	13	144,545,000	100	88	13	144,545,000	-	-		
Rata-rata capaian kinerja (%)																		100	94.75			127	110				
Predikat Kinerja																		ST	ST								

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2022 (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi capaian kinerja Renstra SKPD s/d tahun lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Provinsi Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Provinsi (2021) yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD Provinsi s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.		
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)			K	Rp. (000)
5		Program Pelayanan Penanaman Modal	Jumlah realisasi Investasi	11.345 Trilyun	4,123,264,069	12.268	2,083,648,540	10.145 Trilyun	351,899,734	1.627	66,846,780	0.311	107,639,850	9.54	82,733,135		94,488,735	11.473	351,708,500	113	100	24	2,435,357,040	209	59.08				
2.18.04.1.01		Kegiatan Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Izin dan non izin yang diterbitkan	2,550 Izin dan non	2,066,783,550	951	1,507,390,774	515 Dok	351,899,734	103	66,846,780	73	107,639,850	92	82,733,135	248	94,488,735	516	351,708,500	100	100	1.467	1,859,099,274	58	89.95				
2.18.04.1.01.01		Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah izin dan non izin yang diterbitkan	2,550 izin dan non izin	2,066,783,550	951	1,507,390,774	515 Izin dan Non izin	351,899,734	103	66,846,780	73	107,639,850	92	82,733,135	248	94,488,735	516	351,708,500	100	100	1.467	1,859,099,274	58	89.95	DPMESD MT			
Rata-rata capaian kinerja (%)																			100	100			58	90					
Predikat Kinerja																			ST	ST									
6		Program Hubungan Industrial	Persentase peningkatan perusahaan yang menyelenggarakan program perlindungan jaminan sosial tenaga kerja	7 %	4,603,628,103	2.93	907,366,000	6 %	356,794,455	-	19,554,600		141,569,360		71,605,000	12.04	121,669,190	12.04	354,398,150	201	99	15	1,261,764,150	214	27.41				
2.07.05.1.02		Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kasus Perselisihan/Sengketa Hubungan Industrial yang diselesaikan	175 kasus	268,286,364	75	68,260,000	50 Kasus	79,992,095	5	8,315,000	15	44,576,500	15	17,580,000	20	8,680,000	55.00	79,151,500	110	99	130	147,411,500	74	54.95		PROGRAM STRATEGIS		
2.07.05.1.02.02		Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kasus Perselisihan/Sengketa Hubungan Industrial yang diselesaikan	175 kasus	268,286,364	75	68,260,000	50 Kasus	79,992,095	5	8,315,000	15	44,576,500	15	17,580,000	20	8,680,000	55.00	79,151,500	110	99	130	147,411,500	74	54.95	DPMESD MT			
		Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	Jumlah Dokumen UMP	5 Dokumen	1,175,427,755	3	273,850,000	1 Dokumen UMP	142,432,360	-	11,239,600	-	-	-	34,000,000	1.00	97,192,760	1.00	142,432,360	100	100	4	416,282,360	80	35.42				
		Jumlah perusahaan yang menerapkan upah minimum provinsi	2,300 Perusahaan	2,068,340,392	1,542	347,256,000	550 Perusahaan	134,370,000	172	-	125	96,992,860	28.00	20,025,000	225	15,796,430	550	132,814,290	100	99	2,092	480,070,290	91	23.21					
		Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Jumlah Dokumen UMP	5 Dokumen	1,175,427,755	3	273,850,000	1 Dokumen UMP	142,432,360	-	11,239,600	-	-	-	34,000,000	1	97,192,760	1	142,432,360	100	100	4	416,282,360	80	35.42				
		Jumlah perusahaan yang menerapkan upah minimum provinsi	2,300 Perusahaan	2,068,340,392	1,542	347,256,000	550 Perusahaan	134,370,000	172	-	125	96,992,860	28	20,025,000	225	15,796,430	550	132,814,290	100	99	2,092	480,070,290	91	23.21					
Rata-rata capaian kinerja (%)																			103	99.26			82	38					
Predikat Kinerja																			ST	ST									
7		Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Persentase Jumlah perusahaan yang menerapkan Norma Ketenagakerjaan	12.02 %	2,140,414,033	3.02	378,688,075	7.56 %	168,022,208	2.11	26,430,400	0.09	47,712,338		52,407,300	0.08	39,355,458	2.28	165,905,496	30	99	5	544,593,571	44	26.44				
2.07.06.1.01		Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan	2,049 Perusahaan	2,140,414,033	435	378,688,075	486 Perusahaan	168,022,208	75	26,430,400	100	47,712,338	104	52,407,300	21	39,355,458	300	165,905,496	62	99	735	544,593,571	36	25.44		PROGRAM STRATEGIS		
2.07.06.1.01.01		Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan	2049 perusahaan	2,140,414,033	435	378,688,075	486 Perusahaan	168,022,208	75	26,430,400	100	47,712,338	104	52,407,300	21	39,355,458	300	165,905,496	62	99	735	544,593,571	36	25.44	DPMESD MT			
Rata-rata capaian kinerja (%)																			62	99			36	25					
Predikat Kinerja																			R	ST									

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2022 (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi capaian Kinerja Renstra SKPD s/d tahun lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Provinsi Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Provinsi (2021) yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD Provinsi s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.		
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)			K	Rp. (000)
8		Program Pengelolaan Aspek Geologi	Persentase pemenuhan air bersih di daerah sulit air	54 %	4,803,677,892	46	2,852,552,040	50 %	538,979,036	47	14,353,900	5.00	430,323,000	4.00	84,209,500		9,890,000	56	538,776,400	112	100	102	3,391,328,440	189	70.60				
9	3 29 02 1.02	Kegiatan Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah laporan pengawasan dan pembinaan	5 laporan (180 Pengusaha Air Tanah)	246,684,242	1	5,400,000	1 Laporan	538,979,036	0	14,353,900	0	430,323,000	1	84,209,500	0	9,890,000	1	538,776,400	100	100	2	544,176,400	40	100.00		PROG RAN STRAT BERS		
			Jumlah titik bor air tanah	54 sumur bor (1140 RTS)	3,339,993,650	50	2,732,552,040	3 Sumur Bor		1		1		1		0		3		100		53	2,732,552,040	98	81.81				
			Jumlah Rekomendasi Teknis untuk perizinan air tanah	30 Rekomendasi teknis Perizinan	285,000,000	17	114,600,000	6 Rekomtek Perizinan		0		7		7		0		14		233		31	114,600,000	103	40.21				
3 29 02 1.02 03		Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah	Jumlah laporan pengawasan dan pembinaan	5 laporan (180 Pengusaha Air Tanah)	246,684,242	1	5,400,000	1 Laporan	538,979,036	-	14,353,900		430,323,000		84,209,500		9,890,000	0	538,776,400		-	1	544,176,400	20	220.60		DPMESD MT		
			Jumlah titik bor air tanah	54 sumur bor (1140 RTS)	3,339,993,650	50	2,732,552,040	3 Sumur Bor		1		1		1															
			Jumlah Rekomendasi Teknis untuk perizinan air tanah	30 Rekomendasi teknis Perizinan	285,000,000	17	114,600,000	6 Rekomtek Perizinan				3		3															
Rata-rata capaian kinerja (%)																			216.67	99.96			80	74					
Predikat Kinerja																			ST	ST									
9		Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	Persentase usaha pertambangan yang telah melaksanakan pertambangan yang baik dan benar	100 %	3,644,084,559	100	899,165,590	82.91 %	433,183,648	15.98	89,960,122	13.70	157,444,147	31.780	130,881,200	30.00	54,487,812	91.46	432,773,281	110	100	191	1,331,938,871	191	36.55				
10	3 29 03 1.01	Kegiatan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah usaha pertambangan yang dibina dan diawasi (laporan)	378 IUP	1,244,694,857	125	597,165,225	73 IUP	233,195,680	35	72,950,122	30	90,024,147	-	31,753,800	10	38,057,812	75.00	232,785,881	103	100	200	829,951,106	53	66.68		PROG RAN STRAT BERS		
11			Jumlah Rekomendasi Teknis untuk perizinan usaha pertambangan	211 Rekomendasi Teknis Perizinan	1,208,694,851	69	302,000,365	30 Rekomendasi Teknis Perizinan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	69	302,000,365	33	24.99		PROG RAN STRAT BERS		
			Jumlah dokumen pengawasan terpadu	5 laporan dan peta	1,190,694,851	0	0	1 Laporan dan Peta	199,987,968	0	17,010,000	0	67,420,000	1	99,127,400	0	16,430,000	1.00	199,987,400	100	100	1	199,987,400	20	16.80				
3 29 03 1.01 03		Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Rekomendasi Teknis untuk perizinan usaha pertambangan	211 Rekomendasi Teknis Perizinan	1,208,694,851	69	302,000,365	30 Rekomendasi Teknis Perizinan	0	-	0	-	-	-	-	-	-	232,785,881	-	100	69	534,786,246	33	44.24		DPMESD MT			
			Jumlah usaha pertambangan yang dibina dan diawasi	378 IUP	1,244,694,857	125	597,165,225	73 IUP	233,195,680	35	72,950,122	30	90,024,147		31,753,800	10	38,057,812	75.00		103		200		53					
3 29 03 1.01 01		Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah dokumen pengawasan terpadu	5 laporan dan peta	1,190,694,851	0	0	1 Laporan dan Peta	199,987,968	-	17,010,000		67,420,000	1	99,127,400		16,430,000	1	199,987,400	100	100	1	199,987,400	20	16.80		DPMESD MT		
Rata-rata capaian kinerja (%)																			68	100			53	36					
Predikat Kinerja																			S	ST									

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2022 (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi capaian kinerja Renstra SKPD s/d tahun lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Provinsi Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Provinsi (2021) yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD Provinsi s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.				
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)			K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)			K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
10		Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Persentase peningkatan pemanfaatan sumber energi dan ketenagalistrikan	100 %	20,445,496,825	100	28,743,572,151	92 %	1,088,199,867	79.00	36,143,200		93,531,300		59,989,390	6	750,085,030	85	939,748,920	92	86	185	29,883,321,071	185	145.18		
12	3 29 06 1.06	Kegiatan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan	Jumlah masyarakat tidak mampu yang mendapatkan akses listrik	4,000 RTS	5,227,033,664	1,121	2,775,081,700	450 RTS	1,088,199,867	-	36,143,200	-	93,531,300	-	59,989,390,00	450.00	750,085,030,00	450	939,748,920	100	86	1,571	3,714,830,620	39	71.07		PROG BAK STRUK ESB
	3 29 06 1.06 02	Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah masyarakat tidak mampu yang mendapatkan akses listrik	4,000 RTS	5,227,033,664	1,121	2,775,081,700	450 RTS	1,088,199,867	-	36,143,200		93,531,300		59,989,390	450	750,085,030	450	939,748,920	100	86	1,571	3,714,830,620	39	71.07		DPMESD MT
Rata-rata capaian kinerja (%)																		100	86			39	71				
Predikat Kinerja																		ST	T								
11		Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Persentase peningkatan pemanfaatan sumber energi dan ketenagalistrikan	100 %	20,445,496,825	100	992,994,328	92 %	214,633,206	79.00	17,030,400	-	81,233,032		51,778,360	6	63,969,250	85.00	214,011,042	92	100	185	1,207,005,370	185	5.90		
	3 29 05 1.04	Kegiatan Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	Jumlah instalasi Biogas yang terpasang (Dana Pendampingan DAK)	580 Unit Biogas	667,451,414	72	107,636,268	488 Unit Biogas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	72	107,636,268	12	16.13			
			Jumlah laporan hasil pengawasan terhadap Badan Usaha Daerah dan Non Badan Usaha penyedia energi	41 28 SPBU dan 13 Agen LPG	304,821,414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	100	-	-	-	-	-	-		
			Jumlah Laporan Penghematan Energi	41 Lap	304,821,414	-	209,867,843	1 Laporan	100,000,000	0	31,000,000	-	4,408,586.00	-	63,969,250.00	-	99,377,836	-	99	-	-	-	309,245,679	-	101.45		
			Jumlah masyarakat yang sadar hemat energi	1,000 Org	440,151,411	200	67,690,000	200 Org	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	200	67,690,000	20	15.38			
			Jumlah kelembagaan pengelola pembangkit EBT yang dibentuk	10 Unit	629,768,795	3	120,915,199	2 Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	3	120,915,199	30	19.20			
			Jumlah laporan hasil pengawasan PLTS Terpusat	6 Lap	556,853,710	4	211,527,139	1 Laporan	114,633,206	-	17,030,400	-	50,233,032	-	47,369,774.00	-	114,633,206	100	100	4	326,160,345	67	58.57				
			Jumlah FS/DED Pembangkit EBT	12 Dok	705,000,000	2	268,262,879	1 Dok	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	2	268,262,879	17	38.05				
			Jumlah data potensi panas bumi untuk pemanfaatan langsung	4 Dok	21,285,000	1	7,095,000	- Dok	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	1	7,095,000	25	33.33				
	3 29 05 1.04 07	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Jumlah laporan hasil pengawasan terhadap Badan Usaha Daerah dan Non Badan Usaha penyedia energi	41 28 SPBU dan 13 Agen LPG	304,821,414	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-		DPMESD MT
			Jumlah Laporan Penghematan Energi	20 Lap	406,381,417	3	211,127,843	1 Laporan	100,000,000	-	31,000,000	-	4,408,586	1	63,969,250	1.00	99,377,836	100	99	4	-	-	-	-	-		
			Jumlah instalasi Biogas yang terpasang (Dana Pendampingan DAK)	580 Unit Biogas	667,451,414	72	107,636,268	488 Unit Biogas	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	72	107,636,268	12	16.13				
			Jumlah masyarakat yang sadar hemat energi	1,000 org	440,151,411	200	67,690,000	200 Org	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	200	67,690,000	20	15.38				
			Jumlah kelembagaan pengelola pembangkit EBT yang dibentuk	10 unit	629,768,795	3	120,915,199	2 Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	3	120,915,199	30	19.20		DPMESD MT		
			Jumlah laporan hasil pengawasan PLTS Terpusat	6 lap	556,853,710	4	211,527,139	1 Laporan	114,633,206	-	17,030,400	-	50,233,032	1	47,369,774	1.00	114,633,206	100	100	5	326,160,345	83	58.57		DPMESD MT		
			Jumlah FS/DED Pembangkit EBT	12 Dok	705,000,000	2	268,262,879	1 Dok	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	2	268,262,879	17	38.05				
			Jumlah data potensi panas bumi untuk pemanfaatan langsung	4 Dok	21,285,000	1	7,095,000	- Dok	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	1	7,095,000	25	33.33				
Rata-rata capaian kinerja (%)																		100	99.69			28	40				
Predikat Kinerja																		ST	ST								

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2022 (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi capaian Kinerja Renstra SKPD s/d tahun lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Provinsi Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Provinsi (2021) yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD Provinsi s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.				
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)			K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
12		Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase peningkatan pembangunan dikawasan transmigrasi	100 %	6,370,557,802	64.00	855,919,942	88.00 %	198,199,326	64.00	9,600,000	24	107,005,000		29,475,000		51,581,000	88.00	197,661,000	100	100	152	1,053,580,942	152	16.54		
13	3 32 03 1.01	Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun di kawasan transmigrasi	5 Kawasan	2,586,507,802	-	-	1 Kawasan	198,199,326	-	9,600,000	1	107,005,000		29,475,000.00		51,581,000.00	1.00	197,661,000	100	100	1	197,661,000	20	7.64		
	3 32 03 1.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun di kawasan transmigrasi	5 Kawasan	2,586,507,802	-	-	1 Kawasan	198,199,326	-	9,600,000	1	107,005,000		29,475,000		51,581,000	1.00	197,661,000	100	1	1	197,661,000	20	7.64	DPMESD MT	
Rata-rata capaian kinerja (%)																		100	99.73			20.00	7.64				
Predikat Kinerja																		ST	ST								
13		Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase peningkatan masyarakat transmigrasi yang mandiri	100 %	2,781,679,061	100.00	622,602,750	80.25 %	201,199,677	32.00	25,875,000	30.3	89,185,000	30.25	31,810,000		52,521,000	92.55	199,391,000	115	99	193	821,993,750	193	29.55		
14	3 32 04 1.01	Kegiatan Pengembangan Satuan Pemukiman pada Tahap Pemantapan	Jumlah warga transmigrasi yang mandiri	12,274 Orang	1,861,674,012	1,635	622,602,750	300 Orang	201,199,677	75	25,875,000	75	89,185,000	150	31,810,000		52,521,000	300	199,391,000	100	99.10	1,935	821,993,750	16	44.15		
	3 32 04 1.01 01	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam Rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	Jumlah warga transmigrasi yang mandiri	12,274 Orang	1,861,674,012	1,635	622,602,750	300 Orang	201,199,677	75	25,875,000	75	89,185,000	150	31,810,000		52,521,000	300	199,391,000	100	99	1,935	821,993,750	16	44.15	DPMESD MT	
Rata-rata capaian kinerja (%)																		100	99			16	44				
Predikat Kinerja																		ST	ST								
14		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase peningkatan Jumlah tenaga kerja yang dilatih	45.94 %	3,177,894,731	63.28	1,320,130,400	35.74 %	269,499,370	30	25,000,000	2	183,375,949	2.35	24,716,600	-	31,320,900	34.35	264,413,449	96	98	98	1,584,543,849	213	49.86		
			Persentase peningkatan Jumlah tenaga kerja magang	57.06 %	8,782,215,210	88.70	2,378,270,806	48.10 %	1,073,879,994	78.24	43,584,400	-	498,321,481	-	433,924,200	-	97,500,000	78.24	1,073,330,081	163	100	167	3,451,600,887	293	39.30		
15	2 07 03 1.03	Kegiatan Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah	Jumlah Tenaga Kerja Produktif yang dilatih	235 Org	1,588,947,364	35	165,162,000	5 Orang	64,999,676	-	-	2	39,990,350	3.00	24,716,600		-	5.00	64,706,950	100.00	99.55	40.00	229,868,950	17.02	14.47		
	2 07 03 1.03 01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah	Jumlah Tenaga Kerja Produktif yang dilatih	235 org	1,588,947,364	35	165,162,000	5 Orang	64,999,676	-	-	2	39,990,350	3.00	24,716,600		-	5.00	64,706,950.00	100.00	99.55	40.00	229,868,950.00	17.02	14.47		
		Kegiatan Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang dilatih	235 orang: Kab/Kota se Provinsi Gorontalo	1,588,947,367	345	1,154,968,400	45 orang: Kab/Kota se Provinsi Gorontalo	204,499,694	30	25,000,000	-	143,385,599	-	-	-	31,320,900	30.00	199,706,499	66.67	97.66	375.00	1,354,674,899	100	85.26		
			Jumlah pencari kerja yang dimagangkan	570 orang: Kab/Kota se Provinsi Gorontalo	4,312,267,978	400	1,807,340,500	175 orang: Kab/Kota se Provinsi Gorontalo	1,073,879,994	175	43,584,400	-	498,321,481	-	433,924,200	-	97,500,000	175	1,073,330,081	100.00	99.95	575.00	2,880,670,681	100	66.80		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2022 (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi capaian kinerja Renstra SKPD s/d tahun lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Provinsi Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Provinsi (2021) yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD Provinsi s/d Akhir Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.		
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)			K	Rp. (000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13 = 12/7*100	14 = 6 + 12	15 = 14/5*100	16	17													
		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah pencari kerja yang dimagangkan	570 orang; Kab/Kota se Prov Gorontalo	4,312,267,978	400	1,807,340,500	175 orang; Kab/Kota se Prov Gorontalo	1,073,879,994	175	43,584,400	-	498,321,481	-	433,924,200		97,500,000	175	1,073,330,081	100	100	575	2,880,670,581	101	66.80				
			Jumlah tenaga kerja yang dilatih	235 orang; Kab/Kota se Prov Gorontalo	1,588,947,367	345	1,154,968,400	45 orang; Kab/Kota se Prov Gorontalo	204,499,694	30	25,000,000	-	143,385,599	-	-		31,320,900	30	199,706,499	67	98	375	1,354,674,899	160	85.26				
Rata-rata capaian kinerja (%)												89	99			72	56												
Predikat Kinerja												T	ST																
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM												8,160,981,304		7,886,748,109															
Faktor pendorong keberhasilan kinerja		:-																											
Faktor penghambat		:-																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya		:-		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D PROGRAM 14)												130.77	96.38												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya*)		: Disesuaikan dengan target dalam renstra dan renja OPD		PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D PROGRAM 14)												ST	ST												

\*) diisi oleh Kepala Bappeda



### 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi

- a. Isu-isu strategis yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan perizinan antara lain adalah sebagai berikut:
  - a. Belum tersentralisasi pola penyelenggaraan pelayanan perizinan;
  - b. Rendahnya tingkat kepatuhan investor dalam menyampaikan LKPM;
  - c. Bentuk Kelembagaan OPD yang belum sesuai permendagri nomor 100
  - d. Belum optimalnya optimalnya pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap PMA/PMDN dan Swasta murni;
  - e. Data peluang usaha dan potensi investasi yang belum akurat;
  - f. Belum optimalnya promosi investasi dalam dan luar negeri oleh provinsi dan kabupaten/kota
  - g. Masih terbatasnya SDM baik kuantitas maupun kualitas pelayanan perizinan;
  - h. Belum optimalnya promosi inventasi
  - i. Belum dilaksanakan pelayanan perizinan mobile ke kabupaten/kota
  - j. Kurangnya ketersediaan Feasibility Study objek investasi untuk ditawarkan ke investor;
  - k. Informasi potensi investasi belum dapat diakses dengan baik.
  - l. Belum maksimalnya kinerja pada unit layanan informasi dan pengaduan;
  - m. Belum merata sebaran investasi antara kabupaten/kota dan antar sektor
  - n. Belum optimalnya pelayanan perizinan berbasis IT.
  - o. Dana dan Sarana prasarana pendukung kinerja Pelayanan Perizinan yang masih terbatas.
- b. Isu-isu strategis yang berkaitan langsung dengan urusan ESDM antara lain adalah sebagai berikut:
  1. Tingginya pertumbuhan konsumsi energi listrik, gas dan bahan bakar minyak;





2. Kurangnya tingkat pemahaman masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk penghematan penggunaan energi listrik dan air;
  3. Belum optimalnya potensi pemanfaatan Energi Baru Terbarukan;
  4. Belum tersedianya data base potensi Energi Baru Terbarukan;
  5. Belum optimalnya upaya konservasi dan manajemen energi
  6. Masih terdapat desa/dusun yang sulit dijangkau dengan jaringan listrik;
  7. Belum Optimalnya pemenuhan kebutuhan listrik bagi RTS
  8. Terdapat perbedaan data Rumah Tangga Miskin yang dikeluarkan oleh TNP2K, DBT dan hasil validasi lapangan;
  9. Belum terpenuhinya kebutuhan air bersih di daerah sulit air;
  10. Belum optimalnya penanganan terhadap PETI dan Kegiatan Pertambangan Non Logam
  11. Belum tersedianya data base bencana geologi
  12. Belum tersedianya data base pendukung untuk geopark Provinsi Gorontalo
  13. Belum optimalnya pelaksanaan mitigasi bencana geologi
  14. Belum optimalnya pemenuhan target pajak pemanfaatan air permukaan;
  15. Belum tersedianya data base potensi pertambangan logam dan non logam;
  16. Dinamisnya lokasi (perpindahan penambang) yang dikelola oleh masyarakat sehingga sulit untuk dilakukan pembinaan
- c. Isu-isu strategis yang berkaitan langsung dengan urusan Ketenagakerjaan dan transmigrasi antara lain adalah sebagai berikut :
1. Rendahnya pertumbuhan kesempatan kerja
  2. Rendahnya tingkat partisipasi kerja terutama perempuan
  3. Ketimpangan pertumbuhan kesempatan kerja sektoral dan regional
  4. Meningkatnya angka pengangguran terdidik
  5. Rendahnya tingkat produktivitas pekerja
  6. Produktivitas pekerja yang timpang baik sektoral maupun regional





7. Meningkatnya pekerja sektor informal
  8. Rendahnya tingkat pendapatan pekerja
  9. Rendahnya daya saing dan tingkat pendidikan tenaga kerja
  10. Kesenjangan upah/pendapatan pekerja baik sektoral maupun regional serta antar gender
  11. Belum optimalnya pengawasan ketenagakerjaan lokal dalam negeri dan tenaga kerja asing.
  12. Kurangnya kuantitas dan kualitas LPK dan BLK
  13. Belum optimalnya informasi pasar kerja
  14. Kurangnya tingkat kepatuhan perusahaan dan industri untuk memenuhi UMP;
  15. Kurangnya pembinaan terhadap pihak pemberi kerja dan pekerja tentang harmonisasi HI,
  16. Kurangnya jumlah pejabat fungsional pengawas ketenagakerjaan dan mediator ketenagakerjaan dan instruktur;
  17. Tingginya angka perselisihan HI
  18. Kurangnya SDM dibidang keahlian K3
  19. Kurangnya perhatian pemangku kepentingan terhadap K3
  20. Rendahnya jaminan social ketenagakerjaan dan Jaminan social Kesehatan bagi tenaga kerja di sector informal
  21. Rendahnya nilai indeks Pembangunan Ketenagakerjaan provinsi
- d. Isu-isu strategis yang berkaitan langsung dengan urusan Ketrasmigrasian antara lain adalah sebagai berikut :
1. Adanya kesenjangan antara permukiman transmigrasi dengan permukiman masyarakat sekitar
  2. Rendahnya pemberdayaan masyarakat akibat ketersediaan kualitas dan kuantitas saran dan prasarana yang berada di kawasan transmigrasi





3. Permukiman transmigrasi dan masyarakat sekitarnya belum terstruktur dalam sistem pengembangan kawasan permukiman
4. Peningkatkan ekonomi warga transmigrasi
5. Belum terintegrasi dan terkoordinasikannya program-program antar sektor dalam pembangunan kawasan transmigrasi khususnya pengembangan Kawasan Terpadu Mandiri Paguyaman-Wonosari
6. Kurangnya pembinaan keamanan, kesehatan, mental, spiritual, social, dan budaya lokal bagi warga transmigrasi
7. Kurangnya ketersediaan fasilitas umum, fasilitas sosial dan infrastruktur dasar air dan listrik untuk warga transmigrasi.

#### **2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Review terhadap Dokumen rancangan awal RKPD Provinsi Gorontalo, Rancangan Program/Kegiatan yang tertuang dalam Rancangan Awal RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2023 telah mengacu pada Permendagri nomor 90 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Kepmendagri 050-5889 tahun 2022 tentang Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Kebutuhan dana untuk pelaksanaan program kegiatan belum tertuang pada rancangan awal RKPD tahun 2023. Rancangan Program/Kegiatan yang tertuang dalam Rancangan Awal RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2023 telah sesuai dengan rancangan program kegiatan yang diusulkan pada Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Tahun 2023. Berikut ini tabel Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023.



**TABEL T-C.31**  
**REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023**  
**DINAS PENANAMAN MODAL, ESDM DAN TRANSMIGRASI**  
**PROVINSI GORONTALO**

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					NO	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA		PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	7
1	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	Provinsi Gorontalo	Persentase ketersediaan data zona konservasi dan pemanfaatan air tanah		350,000	1	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	Provinsi Gorontalo	Persentase ketersediaan data zona konservasi dan pemanfaatan air tanah		340,340	
2	Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	Provinsi Gorontalo	Persentase usaha pertambangan yang telah melaksanakan pertambangan yang baik dan benar		275,000	2	Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	Provinsi Gorontalo	Persentase usaha pertambangan yang telah melaksanakan pertambangan yang baik dan benar		244,164	
3	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Provinsi Gorontalo	Persentase jumlah Rumah tangga sasaran yang mendapat sambungan listrik	25%	750,000	3	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Provinsi Gorontalo	Persentase jumlah Rumah tangga sasaran yang mendapat sambungan listrik		718,320	
4	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Provinsi Gorontalo	Persentase pengelolaan energi terbarukan		255,000	3	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Provinsi Gorontalo	Persentase pengelolaan energi terbarukan		244,440	
Urusan Energi Sumber Daya Mineral					1,630,000	Urusan Energi Sumber Daya Mineral					1,547,264	
4	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Provinsi Gorontalo	Persentase peningkatan masyarakat transmigrasi pada tahap pemantapan		200,000	4	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Provinsi Gorontalo	Persentase peningkatan masyarakat transmigrasi yang mandiri	100.00%	178,880	
5	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Provinsi Gorontalo	Persentase peningkatan pembangunan dikawasan transigrasi		325,000	5	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Provinsi Gorontalo	Persentase peningkatan pembangunan dikawasan transimigrasi	100%	294,200	
Urusan Ketransmigrasian					525,000	Urusan Ketransmigrasian					473,080	
6	Program Hubungan Industrial	Provinsi Gorontalo	Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui perjanjian bersama	20%	430,000	6	Program Hubungan Industrial	Provinsi Gorontalo	Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui perjanjian bersama	20%	410,640	
7	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Provinsi Gorontalo	Persentase pelanggaran hukum di bidang norma ketenagakerjaan yang ditangani	20%	190,000	7	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Provinsi Gorontalo	Persentase pelanggaran hukum di bidang norma ketenagakerjaan yang ditangani	20%	180,320	
8	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Provinsi Gorontalo	Persentase pencari kerja yang dilatih		1,350,000	8	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Provinsi Gorontalo	Persentase pencari kerja yang dilatih		1,369,280	
9	Program Penempatan Tenaga Kerja	Provinsi Gorontalo	Persentase jumlah pencari kerja yang di tempatkan		180,000	9	Program Penempatan Tenaga Kerja	Provinsi Gorontalo	Persentase jumlah pencari kerja yang di tempatkan		100,000	
Urusan Ketenagakerjaan					2,150,000	Urusan Ketenagakerjaan					2,060,240	

NO	RANCANGAN AWAL RKP					NO	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA		PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	7
10	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Provinsi Gorontalo	Jumlah data dan dokumen potensi investasi		150,000	10	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Provinsi Gorontalo	Jumlah data dan dokumen potensi investasi		150,000	
11	Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	Provinsi Gorontalo			125,000	11	Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	Provinsi Gorontalo			114,440	
12	Program Promosi Penanaman Modal	Provinsi Gorontalo	Jumlah Dokumen Promosi Invesasi		350,000	12	Program Promosi Penanaman Modal	Provinsi Gorontalo	Jumlah Dokumen Promosi Invesasi		350,000	
13	Program Pelayanan Penanaman Modal	Provinsi Gorontalo	Jumlah Izin dan Non Izin yang di terbitkan		400,000	13	Program Pelayanan Penanaman Modal	Provinsi Gorontalo	Jumlah Izin dan Non Izin yang di terbitkan		380,201	
14	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Provinsi Gorontalo	Persentase kegiatan usaha yang mendapat pembinaan dan pengawasan penanaman modal		815,119	14	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Provinsi Gorontalo	Persentase kegiatan usaha yang mendapat pembinaan dan pengawasan penanaman modal		803,598	
15	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Provinsi Gorontalo	Persentase pelaksanaan perencanaan, evaluasi, monitoring dan pelaporan	100%	16,658,273	15	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Provinsi Gorontalo	Persentase pelaksanaan perencanaan, evaluasi, monitoring dan pelaporan	100%	16,396,988	
Urusan Penanaman Modal					18,498,392	Urusan Penanaman Modal					18,195,227	



## 2.5. Telaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam rangka sinkronisasi program dan kegiatan Pemerintah Provinsi Gorontalo dengan Pemerintah Kabupaten/kota, sekaligus menjaring usulan dan masukan program dan kegiatan dari kabupaten/kota, maka pada awal bulan Maret tahun 2022, Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo akan menyelenggarakan Forum OPD dengan instansi terkait bidang penanaman modal, ESDM, Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo.

Beberapa usulan dari kabupaten/kota pada pelaksanaan Forum OPD tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Beberapa desa/dusun di kabupaten masih ada yang belum tersentuh listrik untuk rumah tangga miskin.
2. Lokasi-lokasi yang sulit air bersih agar dapat diprogramkan melalui provinsi
3. Kabupaten/Kota mengusulkan agar Pemerintah Provinsi dapat menyelenggarakan pelatihan guna peningkatan kapasitas SDM Pelayanan Perizinan
4. Mengenai penempatan warga transmigrasi, diusulkan agar benar-benar warga yang siap ditempatkan di lahan transmigrasi
5. Perlu dilakukan peningkatan kapasitas kemampuan warga transmigrasi dalam pengolahan hasil pertanian
6. Beberapa Kabupaten/Kota mengusulkan untuk pembiayaan kegiatan pelatihan tenaga kerja di masing-masing Kabupaten/Kota.
7. Diusulkan untuk diadakannya Informasi Pasar Kerja Online yang terintegrasi dengan Kabupaten/Kota
8. Kabupaten/Kota minta untuk difasilitasi dalam kegiatan pameran

Adapun Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo sebagaimana tertera pada Tabel berikut:



**TABEL T-C.32**  
**USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2023**  
**DINAS PENANAMAN MODAL, ESDM DAN TRANSMIGRASI PROVINSI GORONTALO**

No.	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(5)		(6)	(8)	(9)
1	<b>Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal</b> - Penetapan pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi	Provinsi Gorontalo	<b>Jumlah data dan dokumen potensi investasi</b>	1 laporan	
	- Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	
	- Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi		Jumlah Peta Potensi Investasi	2 Dokumen	
	- Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi		Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi		
	- Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi		Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Provinsi	1 Dokumen	
2	<b>Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal</b> - Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Provinsi Gorontalo			
	- Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	4 Dokumen	
3	<b>Program Promosi Penanaman Modal</b> - Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Provinsi Gorontalo	<b>Jumlah Dokumen Promosi Invesasi</b>		
	- Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi (DAK dan DAU)		Jumlah Kegiatan promosi yang dilaksanakan Jumlah Dokumen Promosi Invesasi	1 Dokumen	
4	<b>Program Pelayanan Penanaman Modal</b> - Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi	Provinsi Gorontalo	<b>Jumlah Izin dan Non Izin yang di terbitkan</b>		
	- Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Jumlah Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Kewenangan Daerah Provinsi	110 Pelaku usaha	
	- Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal Kewenangan Daerah Provinsi	220 Kegiatan Usaha	
5	<b>Program Pengendali Pelaksanaan Penanaman Modal</b> - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Provinsi Gorontalo	<b>Persentase kegiatan usaha yang mendapat pembinaan dan pengawasan penanaman modal</b>		
	- Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal (DAK dan DAU)		Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	160 Pelaku usaha	
	- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal (DAK)		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	67 Kegiatan usaha	

No.	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(5)		(6)	(8)	(9)
6	<b>Program Pengelolaan Mineral dan Batubara</b>	<b>Provinsi Gorontalo</b>	<b>Persentase kegiatan usaha pertambangan yang melaksanakan kegiatan pertambangan yang baik dan benar</b>		
	- Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut		Jumlah dokumen rekomendasi teknis pertambangan yang terbitkan dan diawasi		
	- Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut		Jumlah dokumen rekomendasi pertambangan yang terbitkan	60 Dokumen	
	- Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut		Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan	1 Laporan	
7	<b>Program Pengelolaan Aspek Gegeologian</b>	<b>Provinsi Gorontalo</b>	<b>Persentase ketersediaan data zona konservasi dan pemanfaatan air tanah</b>		
	- <u>Penetapan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam daerah provinsi</u>		<u>Jumlah data konservasi dan cekungan air tanah</u>		
	- Penentuan dan penetapan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah		Jumlah dokumen Zona Konservasi Air Tanah yang Ditetapkan dalam Daerah Provinsi	1 dokumen dan peta	
	- <u>Penetapan nilai perolehan air tanah dalam daerah provinsi</u>		<u>Jumlah dokumen pemanfaatan air tanah</u>		
	- Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan air tanah		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1 laporan	
8	<b>Program Pelatihan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja</b>	<b>Provinsi Gorontalo</b>	<b>Persentase pencari kerja yang dilatih</b>		
	- Pelaksanaan Latihan kerja berdasarkan klaster kompetensi				
	- Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi		Jumlah pencari kerja yang dilidik dan dilatih	210 orang (60 orang dilatih, 150 orang magang dalam negeri)	Pokir : 1 paket di Kota Gorontalo, 11 paket di Kab. Pohuwato, 30 paket di Kab. Boalemo, 1 paket di Kab. Bone Bolango, 10 paket di Kab. Gorontalo
	- Konsultasi Produktivitas pada perusahaan menengah				
	- Pelaksanaan konsultasi produktivitas kepada perusahaan menengah		Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas	5 perusahaan	
	- Pengukuran produktivitas tingkat daerah provinsi				
	- Pengukuran kompetensi dan produktivitas tenaga kerja		Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	1 Dokumen	
9	<b>Program Penempatan Tenaga Kerja</b>	<b>Provinsi Gorontalo</b>	<b>Persentase jumlah pencari kerja yang di tempatkan</b>		
	- Pelayanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota				
	- Perluasan Kesempatan Kerja		Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	50 orang tenaga kerja perempuan	
	- Pengelolaan informasi pasar kerja				
	- Pelayanan dan penyediaan Informasi pasar kerja online		Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online	750 Orang	

No.	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(5)		(6)	(8)	(9)
10	<b>Program Hubungan Industrial</b>	<b>Provinsi Gorontalo</b>	<b>Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui perantaraan bersama</b>	<b>20%</b>	
	- Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi		Persentase Jumlah Kasus hubungan industrial yang diselesaikan		
	- Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi		Terselesainya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi	50 Kasus	
	- Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektorial Provinsi (UMSP), Upah		Jumlah doumen UMP yang ditetapkan		
	- Penetapan upah minimum provinsi		Jumlah penetapan UMP	1 SK	
11	<b>Program Pengawasan Ketenagakerjaan</b>	<b>Provinsi Gorontalo</b>	<b>Persentase pelanggaran hukum di bidang norma ketenagakerjaan yang ditangani</b>	<b>20%</b>	
	- Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan		Jumlah perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan		
	- Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan		Jumlah perusahaan yang menerapkan norma kerja	420 Perusahaan	
	- Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan		Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan	50	
	- Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja		Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	100 perusahaan	
12	<b>Program Pengelolaan Ketenagalistrikan</b>	<b>Provinsi Gorontalo</b>	<b>Persentase jumlah Rumah tangga sasaran yang mendapat sambungan listrik</b>	<b>25%</b>	
	- Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan				
	- Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi		Jumlah Pelaksanaan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi yang	1 Dokumen	
	- Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi				
	- Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi		Jumlah Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi yang Ditetapkan	1 Dokumen	
	- Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan		Jumlah Kepala keluarga Penerima Manfaat Dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu		
	- Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu		Jumlah Kepala keluarga Penerima Manfaat Dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	225 KK	Pokir: 347 KK di Kab. Boalemo, 134 KK di Kab. Gorontalo, 86 KK di Kab. Gorut, 130 KK di Kab. Bone Bolango, 70 KK di Kab. Gorontalo
13	<b>Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi</b>	<b>Provinsi Gorontalo</b>	<b>Persentase peningkatan pembangunan dikawasan transmigrasi</b>		
	- Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Jumlah Kasawan Transmigrasi yagng di bangun		
	- Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 dokumen	
	- Penyuluhan dan Sosialisasi Program Transmigrasi Kepada Calon Transmigran Penduduk Asal Dan OPD Tingkat Kabupaten/ Kota		Jumlah Calon Transmigran Penduduk Asal dan OPD Tingkat Kabupaten yang Mendapatkan Penyuluhan dan Sosialisasi	100 orang	
	- Pelayanan kesehatan transmigrasi		Jumlah Transmigran yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Transmigran	11 KK	
	- Bantuan Non-Standar Transmigrasi (Dalam Bentuk Barang Sesuai Kearifan Lokal)		Jumlah Bantuan Non-Standar yang Diberikan kepada Transmigran	10 Paket	

No.	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(5)		(6)	(8)	(9)
14	<b>Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi</b>	<b>Provinsi Gorontalo</b>	<b>Persentase peningkatan masyarakat transmigrasi pada tahap pemantapan</b>		
	- Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan		Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang dikembangkan		
	- Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman		Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	11 KK	
	- Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman		Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan	4 SP	
15	<b>Program Pengelolaan Energi Terbarukan</b>		Persentase pengelolaan energi terbarukan		
	- Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi		Jumlah dokumen konservasi energi		
	- Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi		Jumlah dokumen pengembangan Energi terbarukan	1 Dokumen	
	- Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi		Jumlah laporan pemantauan dan pembinaan pemanfaatan pembangkit EBT	1 Laporan	



## BAB III

### TUJUAN dan SASARAN

#### 3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

##### *a. Kebijakan nasional terkait dengan urusan ketenagakerjaan*

Kementerian Ketenagakerjaan menetapkan tiga kebijakan Kementerian Ketenagakerjaan untuk memperbaiki ekosistem ketenagakerjaan secara keseluruhan. Tiga kebijakan ini untuk mendukung visi Indonesia untuk menjadikan pembangunan SDM sebagai kunci memajukan Indonesia. Tiga kebijakan tersebut adalah (1). penciptaan ekosistem ketenagakerjaan yang kondusif, baik bagi pengusaha ataupun pekerja melalui perbaikan regulasi di bidang ketenagakerjaan; (2). peningkatan perlindungan pekerja dan penciptaan lapangan kerja yang massif; (3). penciptaan pasar kerja yang fleksibel dan efisien.

Dukungan pemerintah provinsi Gorontalo terhadap kebijakan tersebut yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo sebagai instansi yang menangani urusan ketenagakerjaan di daerah adalah sebagaimana tertuang dalam program kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 yaitu:

1. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan kegiatan Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi dan sub kegiatan berupa Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan tenaga kerja produktif serta.
2. Program Penempatan Tenaga Kerja, kegiatan ini dilakukan untuk penciptaan pasar kerja yang fleksibel dan efisien serta penciptaan ekosistem ketenagakerjaan yang kondusif.
3. Program Hubungan Industrial kegiatan ini fokus pada penetapan Upah minimum Provinsi dan upaya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1





(satu) Daerah Provinsi untuk penciptaan ekosistem ketenagakerjaan yang kondusif.

4. Program Pengawasan Ketenagakerjaan, kegiatan ini fokus pada pengawasan norma ketenagakerjaan untuk peningkatan perlindungan pekerja dan penciptaan lapangan kerja yang massif serta ekosistem ketenagakerjaan yang kondusif.

**b. Kebijakan nasional terkait dengan urusan ketenagalistrikan**

Arah Kebijakan nasional terkait dengan ketenagalistrikan nasional sebagaimana terdapat dalam RUKN 2019-2038 yang memuat beberapa poin yaitu:

1. Arah Pengembangan Pembangkit Tenaga Listrik yang menjamin ketersediaan listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas baik, harga wajar
2. Arah pengembangan Transmisi Tenaga Listrik dimana transmisi tenaga listrik wajib membuka kesempatan untuk pemanfaatan bersama jaringan transmisi tenaga listrik (mekanisme sewa/power wheeling) bagi kepentingan umum dengan memperhatikan kemampuan kapasitas jaringan transmisi dan Aturan Jaringan Tenaga Listrik (Grid Code)".
3. Arah Pengembangan Gardu Induk, Minimal 1 GI untuk setiap kabupaten/kota kecuali daerah kepulauan kecil yang menurut hasil kajian tidak layak secara teknis dan ekonomi, GI baru dikembangkan apabila GI terdekat tidak dapat memenuhi kebutuhan beban dan tidak memungkinkan lagi dilakukan penambahan trafo dan perlengkapan serta instrumen pendukung
4. Arah Pengembangan Elektrifikasi dan Distribusi dengan target tahun 2019 sebesar 99,9% dan tahun 2020 sebesar 100% yang dijabarkan kedalam 6 poin yaitu:
  - a. Perbaikan tegangan, perbaikan SAIDI dan SAIFI, penurunan susut jaringan tenaga listrik dan rehabilitasi jaringan tua
  - b. Perbaikan tegangan, perbaikan SAIDI dan SAIFI, penurunan susut jaringan tenaga listrik dan rehabilitasi jaringan tua





- c. Membuka kesempatan untuk pemanfaatan bersama jaringan distribusi dengan memperhatikan kemampuan kapasitas jaringan distribusi dan mengacu pada Aturan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik (Distribution Code)
  - d. Pengembangan jaringan distribusi dengan teknologi smart grid dan kabel laut (submarine cable) antar pulau dapat dilakukan sepanjang memenuhi kebutuhan sistem dan ketersediaan teknologi.
  - e. Pengembangan micro grid untuk meningkatkan keandalan dan mengoptimalkan bauran energi pembangkitan pada suatu daerah terpencil yang jauh dari sistem besar
  - f. Pengembangan jaringan distribusi tenaga listrik di daerah perbatasan negara dimana dilakukan kegiatan jual beli tenaga listrik lintas negara hanya dapat dilakukan oleh Pemegang IUPTL setelah memperoleh izin penjualan atau pembelian tenaga listrik lintas negara dari Menteri ESDM
5. Arah Pengembangan Smart Grid & Listrik 4.0 yang mengarah pada Teknologi digital memungkinkan komunikasi dua arah antara perusahaan listrik (utility) dan konsumennya, dan adanya penginderaan di sepanjang jaringan transmisi dan distribusi; dan Berkembangnya teknologi panel surya atau photovoltaic (PV) panel dengan efisiensi panel yang tinggi dan biaya produksi pengoperasian yang rendah mendasari paradigma baru yaitu Listrik 4.0.
6. Target Bauran Energi dimana nasional menargetkan tahun 2025 penggunaan energi baru terbarukan sebesar 23%

Dukungan pemerintah provinsi Gorontalo terhadap kebijakan tersebut yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo sebagai instansi yang menangani urusan ketenagalistrikan di daerah tahun 2023 adalah dilakukan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh daerah sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan





Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dimana Dinas Penanaman Modal ESDM dan Transmigrasi hanya dapat melaksanakan program kegiatan sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Energi Terbarukan, Kegiatan Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi
  - a. Sub Kegiatan pengalokasian anggaran untuk program Konservasi Energi
  - b. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi dengan target pembinaan kelembangan pengelola energi baru terbarukan.
2. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan, kegiatan penganggaran untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan
  - a. Sub Kegiatan Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu dengan target 225 unit rumah terpasang listrik.
  - b. Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi

***c. Kebijakan nasional terkait dengan urusan Sumber Daya Mineral***

Kebijakan nasional terkait urusan sumber daya mineral dengan berlakunya undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, maka kewenangan pemerintah provinsi sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada lampiran ketentuan mengenai pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota pada Angka I Matriks Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah





Kabupaten/Kota huruf CC Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Sub Urusan Mineral dan Batubara, dinyatakan di cabut dan tidak berlaku. Oleh karena itu target capaian yang tetapkanoleh daerah juga akan mengaami perubahan baik dari sisi perizinan maupun sisi kegiatan pertambangan sendiri.

Namun menindaklanjuti hasil sosialisasi Peraturan Pemerintah sebagai turunan dari undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, ada Sebagian urusan pemerintah pusat akan didelegasikan ke daerah yaitu

- a) Penatausahaan izin mineral non logam dan batuan
- b) Pembinaan dan Pengawasan pertambangan mineral non logam dan batuan

***d. Kebijakan nasional terkait dengan urusan penanaman modal dan perizinan***

Kebijakan nasional terkait penanaman modal difokuskn pada percepatan pelayanan perizinan baik PMA maupun PMDN. Realisasi investasi Kementerian Investasi dan BKPM memberikan target ke daerah dalam hal ini Provinsi Gorontalo pada tahun 2023 sebesar Rp. 2,3 Triliun. Provinsi Gorontalo menetapkan target daerah yaitu peningkatan nilai investasi sebesar 15% serta besar nilai investasi adalah sebesar Rp. 2,3 Triliun sebagaimana tertuang dalam RENSTRA Dinas Penanaman Modal ESDM dan Transmigrasi Tahun 2032-2026. untuk mencapai taerget tersebut makan dalam renja Dinas Penanaman Modal ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo tahun 2023 akan melaksanakan kegiatan berupa:

1. Program pengembangan iklim penanaman modal  
Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi  
Sub Kegiatan:
  - a. Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi
2. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal





Kegiatan Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi  
Sub Kegiatan:

a. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

3. Program promosi penanaman modal

Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi

Sub Kegiatan:

a. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi

4. Program Pelayanan Penanaman Modal

Kegiatan Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan:

a. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

b. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal

5. Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal

Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi

Sub Kegiatan:

a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal

b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal





### 3.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Penanaman Modal ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo mengacu pada RPMD Provinsi Gorontalo Tahun 2023 – 2026 Dengan diformulasikannya tujuan dan sasaran ini, maka Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi target – target yang tertuang dalam dokumen RENSTRA tahun 2023 – 2026, untuk kurun waktu tiga tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Dalam Renstra Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo, tujuan tersebut adalah:

1. Meningkatnya nilai tambah produk unggulan daerah, lapangan kerja dan daya saing perekonomian
2. Meningkatnya daya saing dan kemandirian desa
3. Meningkatnya ketahanan terhadap dampak bencana dan bahaya iklim
4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan

Selanjutnya, untuk mencapai hasil yang optimal yang ingin dicapai selama periode perencanaan, maka Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo merumuskan sasaran dan indikator kinerja berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatnya nilai tambah produk unggulan daerah, lapangan kerja dan daya saing perekonomian dengan sasaran, dapat dicapai dengan sasaran:  
Meningkat nilai realisasi investasi (Triliun), meningkatnya jumlah penempatan tenaga kerja, Meningkatnya pengawasan ketenagakerjaan, K3 dan perlindungan pekerja/buruh, Meningkatnya kondisi hubungan industrial yang kondusif, dengan indikator kerjanya :
  - Peningkatan realisasi investasi
  - Peningkatan Nilai Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK)
2. Meningkatnya daya saing dan kemandirian desa, dapat dicapai dengan sasaran :





Mendorong peningkatan ekonomi pedesaan berbasis potensi lokal dengan pendekatan klaster kawasan strategis, dengan indikator kerjanya :

- Persentase Jumlah Rumah Tangga Sasaran yang terpasang listrik
- Persentase jumlah kawasan transmigrasi yang dikembangkan

3. Meningkatnya ketahanan terhadap dampak bencana dan bahaya iklim, dapat dicapai dengan sasaran :

Pembangunan Rendah Karbon, dengan indikator kerjanya:

- Persentase bauran energi terbarukan

4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, dapat dicapai dengan sasaran :

Penataan Lembaga, Penguatan Manajemen ASN, Penguatan Akuntabilitas kinerja, kualitas perencanaan, Penatausahaan Keuangan dan Pengawasan, dengan indikator kerjanya: Nilai LKIP DPM-ESDMT

### 3.3. Program Kegiatan

Program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

3.3.1. Sasaran meningkat nilai realisasi investasi dapat direalisasikan dengan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI  
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan





- a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - Sub Kegiatan
    - a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Sub Kegiatan
    - a. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
  - Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi
  - Sub Kegiatan:
    - a. Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi
3. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
  - Kegiatan Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi
  - Sub Kegiatan:
    - a. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
4. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
  - Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
  - Sub Kegiatan:
    - a. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi
5. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
  - Kegiatan Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
  - Sub Kegiatan:
    - a. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
    - b. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal





6. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi

Sub Kegiatan:

- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
- b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

7. PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA

Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut

Sub Kegiatan:

- a. Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut
- b. Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut

3.3.2. Sasaran meningkatnya jumlah penempatan tenaga kerja, Meningkatnya pengawasan ketenagakerjaan, K3 dan perlindungan pekerja/buruh, Meningkatnya kondisi hubungan industrial yang kondusif dengan indikator kinerja meningkatnya nilai Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan dapat direalisasikan dengan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah





Sub Kegiatan

- a. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

2. PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

Kegiatan Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi

Sub Kegiatan

- a. Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi

Kegiatan Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Menengah

Sub Kegiatan

- a. Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah

Kegiatan Pengukuran produktivitas tingkat daerah provinsi

Sub Kegiatan

- a. Pengukuran kompetensi dan produktivitas tenaga kerja

3. PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA

Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja

Sub Kegiatan

- a. Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online

Kegiatan Pelayanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota

Sub Kegiatan

- b. Perluasan kesempatan kerja

4. PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL

Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi

Sub Kegiatan:

- a. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi

Kegiatan Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)





Sub Kegiatan:

- a. Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)

5. PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan

Sub Kegiatan:

- a. Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan

3.3.3. Sasaran Mendorong peningkatan ekonomi pedesaan berbasis potensi lokal dengan pendekatan klaster kawasan strategis, dengan indikator kinerjanya berupa Persentase Jumlah Rumah Tangga Sasaran yang terpasang listrik dan Persentase jumlah kawasan transmigrasi yang dikembangkan dapat direalisasikan dengan melaksanakan program kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

1. PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN

Kegiatan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan

Sub Kegiatan:

- a. Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu Penatausahaan izin Operasi yang fasilitasnya dalam daerah provinsi

Sub Kegiatan:

- a. Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasional yang fasilitasnya dalam daerah provinsi.

2. PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI

Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

Sub Kegiatan:

- a. Penyuluhan dan Sosialisasi Program Transmigrasi Kepada Calon Transmigran Penduduk Asal Dan OPD Tingkat Kabupaten/ Kota
- b. Bantuan Non-Standar Transmigrasi (Dalam Bentuk Barang Sesuai Kearifan Lokal)





1. PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI

Kegiatan Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pematapan

Sub Kegiatan:

- a. Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam Rangka Pematapan Satuan Permukiman

3.3.4. Sasaran pembangunan rendah karbon, dengan indikator kinerjanya Persentase bauran energi terbarukan dapat direalisasikan dengan melaksanakan program kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN

Kegiatan Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi

Sub Kegiatan:

- a. Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi
- b. Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi





## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Adapun Program Kegiatan Dinas Penanaman Modal, ESDM, Transmigrasi Provinsi Gorontalo yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023 sebagaimana berikut:

#### A. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA

##### 1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

###### Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan

- a. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

##### 2. PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

###### Kegiatan Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi

Sub Kegiatan

- a. Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi

###### Kegiatan Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Menengah

Sub Kegiatan

- a. Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah

###### Kegiatan Pengukuran produktivitas tingkat daerah provinsi

Sub Kegiatan

- a. Pengukuran kompetensi dan produktivitas tenaga kerja

##### 3. PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA

###### Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja

Sub Kegiatan

- a. Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online

###### Kegiatan Pelayanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota

Sub Kegiatan

- b. Perluasan kesempatan kerja





#### 4. PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL

**Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi**

Sub Kegiatan:

- a. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi

**Kegiatan Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)**

Sub Kegiatan:

- a. Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)

#### 5. PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

**Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan**

Sub Kegiatan:

- a. Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan

### B. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL

#### 1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan:

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD

**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan

- a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**





Sub Kegiatan

- a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Sub Kegiatan

- b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

**2. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**

**Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi**

Sub Kegiatan:

- a. Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi

**3. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**

Kegiatan Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi

Sub Kegiatan:

- a. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

**4. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**

**Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**

Sub Kegiatan:

- a. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi

**5. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**

**Kegiatan Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota**

Sub Kegiatan:

- a. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
- b. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal

**6. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**

**Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**





Sub Kegiatan:

- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
- b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

## C. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

### 1. PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KE GEOLOGIAN

**Penetapan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam daerah provinsi**

Sub Kegiatan:

- a. Penentuan dan penetapan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah
- b. Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan air tanah

### 2. PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA

**Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut**

Sub Kegiatan:

- a. Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut
- b. Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut

### 3. PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN

**Kegiatan Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi**

Sub Kegiatan:

- a. Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi
- b. Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi





#### 4. PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN

##### **Kegiatan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan**

Sub Kegiatan:

- a. Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu

##### **Kegiatan Penatausahaan izin Operasi yang fasilitasnya dalam daerah provinsi**

Sub Kegiatan:

- a. Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasional yang fasilitasnya dalam daerah provinsi

#### D. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI

##### 1. PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI

##### **Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**

Sub Kegiatan:

- a. Penyuluhan dan Sosialisasi Program Transmigrasi Kepada Calon Transmigran Penduduk Asal Dan OPD Tingkat Kabupaten/ Kota
- b. Bantuan Non-Standar Transmigrasi (Dalam Bentuk Barang Sesuai Kearifan Lokal)

##### 2. PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI

##### **Kegiatan Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pematapan**

Sub Kegiatan:

- a. Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam Rangka Pematapan Satuan Permukiman

Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo sebagaimana tertera pada Tabel berikut:





## BAB V

### PENUTUP

Demikian Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 Dinas Penanaman Modal, Energi Sumber Daya Mineral ini dibuat untuk menjadi dokumen perencanaan periode RPD 2023-2026. Renja tahun 2023 disamping memberi gambaran mengenai capaian pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya, juga berguna sebagai acuan dalam penyusunan program dan kegiatan tahun 2023.

Hal-hal telah dicapai dengan kinerja yang masih belum tercapai atau kurang **Baik** dan **Sangat Baik** tetap dipertahankan, sementara program yang belum berjalan dengan baik perlu dilakukan peningkatan kinerja guna mencapai sasaran yang telah ditargetkan.

#### 5.1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian

Pada usulan RENJA tahun 2023 ini terdapat beberapa kegiatan yang perlu penyesuaian dengan target yang ada pada RENSTRA dinas. Selain itu adanya rencana perubahan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal ESDM dan Transmigrasi akan berpengaruh terhadap kebutuhan anggaran khususnya pada urusan kesekretariatan. Beberapa kegiatan yang perlu mendapat perhatian Kembali adalah sebagai berikut:

- I. Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi. Kegiatan ini merupakan kegiatan pelatihan bagi pencari kerja, berdasarkan hasil review dokumen perencanaan tenaga kerja Provinsi Gorontalo Tahun tahun 2021 di peroleh bahwa jumlah tenaga kerja yang harus dilatih selama 5 tahun kedepan adalah sebanyak 10.000 orang tenaga kerja, sementara jumlah tenaga kerja yang dilatih setiap tahunnya tidak sampai 1.000 orang.
- II. Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, kegiatan ini merupakan kegiatan pemasangan listrik gratis pada rumah tangga tidak mampu. Target akhir RENSTRA yang harus di penuhi pada tahun 2023





adalah 890 unit, pada Rencana Kerja Dinas tahun 2023 mampu mengakomodir 225 unit.

- III. Disektor sumber daya mineral terjadi perubahan kewenangan terkait dengan urusan pertambangan setelah terbitnya undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, semua kewenangan terkait pertambangan menjadi kewenangan pemerintah pusat. Namun demikian berdasarkan draft peraturan presiden terkait kewenangan pertambangan, dimana gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah maka masih terdapat beberapa kewenangan yang akan diserahkan ke daerah diantaranya perijinan mineral ukan logam dan batuan serta ijin usaha jasa pertambangan. Demikian halnya dengan urusan kegeologian.
- IV. Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan, Target RENSTRA tahun 2023 adalah 793 perusahaan yang harus diawasi, anggaran yang terakomodir dalam usulan Rencana Kerja Dinas adalah untuk pengawasan 250 perusahaan.

## 5.2. Kaidah-kaidah pelaksanaan

Pelaksanaan program kegiatan yang ada pada dokumen Rencana Kerja tahun 2023 ini akan dilaksanakan sesuai prosedur yang telah di tentukan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Terhadap catatan penting diatas akan menjadi bahan diskusi/masukkan pada bidang mitra dalam penentuan pagu akhir program kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023.

## 5.3. Rencana Tindak lanjut

Rencana tindak lanjut terhadap catatan penting diatas adalah tetap memperhatikan dan menjadikan target akhir renstra sebagai acuan dalam pelaksanaan program kegiatan. Oleh karena itu untuk pemenuhan target RENSTRA beberapa target kegiatan tersebut diatas akan dimasukkan menjadi usulan tambahan yang kemudian akan dibahas pada tingkat selanjutnya.





Goontalo, Juli 2022

**Kepala Dinas  
Penanaman Modal ESDM dan Transmigras  
Provinsi Gorontalo**



**Bambang Trihandoko, SP, M.Si**  
**NIP. 19750823 199903 1 004**

